

**SEJARAH ORI TAHUN 1946 – 1949
SEBUAH STUDI KOLEKSI
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA**



Disusun Oleh :

**V. Agus Sulistya, S.Pd
Haris Budiarto, SS, M.Hum
Winarni, SS
Darsono, S.Pd
Aryani Setyaningsih, SS, MA**



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah telah membuktikan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaannya. Hal ini berarti secara de jure bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan dan berhak menentukan nasibnya sendiri. Demikian pula berhak untuk berkembang menjadi bangsa merdeka dan berdaulat bebas dari tekanan bangsa lain manapun. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Memang, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, namun untuk memperoleh kedaulatan masih harus ditempuh melalui perjuangan yang tidak ringan. Adanya Intervensi pasukan Jepang yang masih berkekuatan penuh serta masuknya tentara Sekutu yang diboncengi oleh NICA menjadi semakin lengkaplah isi album sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Perjuangan baik secara fisik maupun diplomasi dilakukan oleh Bangsa Indonesia untuk memperoleh kembali kedaulatannya. Sumber daya manusia, taktik dan politik dikerahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Satu hal lagi yang tidak boleh dilepaskan dari kisah heroik sejarah perjuangan bangsa Indonesia yaitu modal ekonomi. Segala bentuk perjuangan baik perjuangan fisik maupun perjuangan diplomasi tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan finansial. Dapat dikatakan bahwa masalah keuangan pada masa awal kemerdekaan Indonesia merupakan masalah pokok yang harus diselesaikan dengan segera. Uang adalah simbol kemerdekaan dan kedaulatan. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat harus memiliki mata uang sendiri.

Pada tahun-tahun pertama setelah proklamasi keadaan ekonomi bangsa Indonesia kacau balau. Inflasi yang cukup tinggi melanda seluruh negeri akibat beredarnya uang Jepang yang mencapai milyaran rupiah Jepang. Kondisi ini diperkeruh dengan masuknya pasukan NICA (*Netherland Indie Civil Administration*) yang datang ke Indonesia dengan membonceng tentara Sekutu. Mereka berhasil menguasai bank-bank di Indonesia. Percetakan G.

Kolf yang pada mulanya dipergunakan untuk mencetak uang Jepang tidak luput menjadi sasaran penguasaan pasukan NICA. Dengan tujuan memperkeruh suasana pasukan NICA mengeluarkan cadangan uang Jepang yang masih ada. Kekacauan moneter ini diperparah lagi dengan keluarnya "Uang NICA" yang berhasil dicetak oleh NICA.

Keadaan ini dipandang sebagai hal yang membahayakan perekonomian Indonesia. Namun pemerintah tidak dapat berbuat banyak mengingat waktu itu belum mampu mencetak uang sendiri. Pemerintah RI mengambil Langkah strategis dengan mengeluarkan Maklumat Presiden RI No. 1/10, tanggal 3 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa menetapkan untuk sementara waktu yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah tiga jenis mata uang antara lain uang *de Javasche Bank*, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang pendudukan Jepang.¹

Uang adalah tanda kemerdekaan suatu negara. Sebuah negara merdeka tidaklah cukup dengan hanya memiliki pemerintahan, tanah air dan rakyat. Mata uang sendiri haruslah dimiliki juga. Memiliki mata uang sendiri adalah sebuah tindakan politis guna memantapkan identitas bangsa dan negara. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bung Hatta seperti telah diuraikan tersebut diatas, menjadi dasar pemikiran bahwa bangsa Indonesia harus mencetak mata uang sendiri.

Dengan usaha keras yang dilandasi kecintaan terhadap tanah air, nusa dan bangsa akhirnya pada tanggal 30 Oktober 1946 keluarlah emisi pertama uang kertas ORI (*Oeang Repoeblik Indonesia*). Selanjutnya ORI terus berkembang dan menjadi simbol revolusi. Hal ini karena ORI lahir pada masa revolusi fisik dimana bangsa Indonesia sedang terbakar semangat api revolusi perjuangan melawan tentara Belanda yang berusaha menjajah kembali Indonesia melalui agresi militernya baik yang pertama tahun 1947 maupun yang kedua tahun 1948. Bahkan ORI juga memiliki peran strategis sebagai alat

¹Wiratsongko, dkk , *Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1949*, (Jakarta : Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 Dan Perum Peruri Jakarta, 1991), hal 4

revolusi. ORI dipakai oleh TNI dan pejuang lainnya sebagai alat untuk melawan uang NICA. Hal ini bukan tanpa konsekuensi, melainkan nyawa sebagai taruhannya pada masa revolusi.

Lahirnya ORI merupakan satu babak dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari pengalaman kolektif Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Proses lahirnya ORI merupakan sebuah perjuangan panjang yang patut diketahui oleh generasi muda masa kini. Uang rupiah yang kita pakai saat ini dipelopori oleh ORI yang pada masanya merupakan simbol dan alat revolusi.

B. Permasalahan

Pada tahun 1997, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta menerima limpahan tugas dari Museum Negeri Propinsi Sonobudoyo untuk mengelola Museum Perjuangan yang memiliki banyak koleksi benda-benda berserjarah yang kaya informasi. Keberadaan koleksi-koleksi tersebut sangat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu koleksi tersebut adalah benda-benda yang terkait dengan pencetakan ORI. Sementara itu lahirnya ORI sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah RI pada masa awal kemerdekaan hingga tahun 1949 merupakan periode sejarah keuangan di Indonesia yang sangat menarik untuk dikaji. Sisi menarik dari hal ini diperkuat dengan masih adanya benda-benda bukti material proses lahirnya ORI sebagai mata uang yang berfungsi sebagai alat revolusi pada tahun 1945-1949. Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini perlu kami sampaikan beberapa permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Mata uang apa saja yang pernah beredar di Indonesia dari penjajahan Belanda hingga terbitnya ORI sebagai alat pembayaran yang sah?
2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi Indonesia menjelang terbitnya ORI sebagai alat pembayaran yang sah?
3. Bagaimana proses pencetakan ORI di Yogyakarta, yang erat kaitannya dengan informasi koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta yang terkait dengan sejarah perkembangan ORI sebagai alat revolusi?

4. Apa saja koleksi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta yang erat kaitannya dengan sejarah dan perkembangan ORI dalam kapasitasnya sebagai alat revolusi?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam kegiatan pengkajian koleksi museum ini secara temporal berkisar antara tahun 1946 sampai dengan tahun 1950. Pengambilan lingkup tahun 1946 dilatarbelakangi dengan pengertian bahwa ORI mulai dicetak dan diedarkan sejak tahun 1946. Sedangkan tahun 1950 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pada tahun tersebut ORI mulai ditarik dari peredarannya. Meski demikian dalam kegiatan ini tidak dapat mengesampingkan peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya maupun sesudahnya. Hal itu disebabkan karena dalam memahami suatu peristiwa dalam konteks sejarah tidak dapat dilepaskan dari peristiwa yang mendahuluinya maupun yang sesudahnya. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan pembahasan dalam kegiatan pengkajian koleksi ini akan mengulas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1946 dan sesudah tahun 1950.

Batasan lain dalam ruang lingkup pembahasan kegiatan pengkajian ini adalah spasial yang terpusat pada kota Yogyakarta. Hal ini mengacu pada koleksi yang dikaji adalah koleksi yang terkait dengan pencetakan uang (ORI) yang diselenggarakan di Yogyakarta. Namun mengingat sejarah ORI berawal dari Jakarta dan kemudian berkembang dan mengalami migrasi ke daerah-daerah pedalaman seperti Surabaya, Solo, dan Yogyakarta, maka sangat tidak bijaksana jika dalam kegiatan pengkajian ini mengabaikan tempat-tempat tersebut.

Dalam cakupan materi pembahasan dalam kegiatan ini mencakup beberapa permasalahan antara lain bagaimana kondisi sosial ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan sehingga menjadi latar belakang muncul ORI sebagai alat pembayaran yang sah. Bagaimana proses lahirnya ORI sebagai mata uang yang besar peranannya dalam revolusi atau bahkan

menjadi simbol dan alat revolusi. Lebih rinci lagi bagaimana proses pencetakan uang (ORI) di Yogyakarta yang peralatan atau barang-barang yang mempunyai kaitan langsung dalam pencetakan tersebut disimpan di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan kegiatan penelitian koleksi ini adalah dengan metode sejarah kritis. Berawal dari pengumpulan data, seleksi data (kritik), analisa data, dan diakhiri dengan penulisan hasil penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka di pusat-pusat referensi seperti perpustakaan daerah, perpustakaan institusi pendidikan, maupun perpustakaan nasional. Guna memperoleh sumber yang mendekati obyektif dan sejaman, pencarian data dari surat kabar-surat kabar sejaman sangat perlu dilakukan. Disamping itu juga perlu memperoleh informasi dari para narasumber yang dianggap tahu tentang materi penelitian seperti pengelola Museum Bank Indonesia. Sejalan dengan majunya teknologi informasi pencarian sumber juga perlu dilakukan melalui internet, namun tentu saja harus tetap dalam koridor metode sejarah kritis.

Selanjutnya penulisan hasil penelitian disusun secara deskriptif naratif dengan pendekatan historis. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dalam penjelasan tentang isi hasil penelitian dapat lebih rinci dan menunjukkan keterkaitan satu dengan yang lain.

Sebagai museum yang juga memiliki fungsi sebagai sumber informasi maka sudah seharusnya koleksi-koleksi yang menjadi obyek pengelolaannya dapat bercerita banyak dan mampu menjadi media rekonstruksi sejarah yang diwakilinya. Informasi yang lengkap dan kredibel sangat diperlukan dalam hal ini. Terkait dengan hal tersebut maka dipandang perlu bahwa dalam kegiatan penelitian ini dilakukan pendekatan multi dimensi. Khusus untuk penelitian koleksi museum yang terkait dengan sejarah perkembangan ORI ini perlu meminjam konsep-konsep dari ilmu bantu sejarah seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, serta ilmu numismatik yang khusus mempelajari tentang mata uang.

E. Tujuan

Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan penelitian koleksi museum yang terkait dengan sejarah dan perkembangan ORI ini antara lain :

1. Mengetahui sejarah dan perkembangan ORI sebagai mata uang pertama asli Indonesia yang sah.
2. Meningkatkan nilai informasi koleksi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta khususnya koleksi-koleksi yang terkait dengan sejarah dan perkembangan ORI.
3. Meningkatkan peran Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai sumber informasi sejarah, khususnya sejarah tentang ORI.

F. Kerangka Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup
- D. Metode Penelitian
- E. Tujuan
- F. Kerangka Penulisan
- G. Peneliti

Bab II. UANG SEBAGAI ALAT TUKAR

- A. Masa Hindia Belanda
- B. Masa Pendudukan Jepang

Bab III. ORI ALAT REVOLUSI

- A. Kondisi Sosial Ekonomi Masa Awal Kemerdekaan
- B. ORI Lahir Dalam Kancah Revolusi
- C. Pencetakan ORI di Yogyakarta

Bab IV. KOLEKSI MUSEUM TERKAIT DENGAN ORI

Bab V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

G. Peneliti

Tenaga peneliti dalam kegiatan pengkajian koleksi museum terkait dengan sejarah ORI ini ditunjuk berdasarkan Surat Tugas Kepala Museum Benteng Vredeborg Yogyakarta Nomor : KP.105/068/MBVY/DKP/2010, tanggal 1 Januari 2010 dengan susunan personel sebagai berikut :

1. V. Agus Sulistya, S.Pd sebagai Ketua
2. Haris Budiarto, SS, M.Hum sebagai Sekretaris
3. Winarni, SS sebagai Anggota
4. Darsono, S.Pd sebagai Anggota
5. Aryani Setyaningsih, SS, MA sebagai Anggota

BAB II

UANG SEBAGAI ALAT TUKAR

Uang dalam tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di dalam proses pertukaran barang. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran.¹

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktifitas.

Pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini diterbitkan oleh pemerintah. Namun sejak dikeluarkannya UU No. 13 tahun 1968 pasal 26 ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal.² Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroi.

Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.

¹*Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru – van Hoeve), hal : 3622

²*UU No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral*

Perkembangan selanjutnya dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem *barter*, yaitu barang yang ditukar dengan barang.

Namun pada akhirnya, banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (*generally accepted*), benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan sehari-hari; misalnya yang oleh orang digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Orang menyebut upah sebagai *salary* yang berasal dari bahasa Latin *salarium* yang berarti garam.³

Barang-barang yang dianggap indah dan bernilai, seperti kerang, pernah dijadikan sebagai alat tukar sebelum menemukan uang logam.

Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu antara lain karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan (*storage*), dan pengangkutan (*transportation*) menjadi sulit dilakukan serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama.

Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama

³Wikipedia, <http://rd.wikipedia.org/wiki/uang>

dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh (*full bodied money*). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah logam mulia (emas dan perak) sangat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar sehingga diciptakanlah *uang kertas*.

Mula-mula uang yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas (secara langsung) sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan 'kertas-bukti' tersebut sebagai alat tukar.

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua : fungsi asli dan fungsi turunan.

Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai.⁴

Uang berfungsi sebagai alat tukar atau *medium of exchange* yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara dapat diatasi dengan pertukaran uang.

⁴*Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru – van Hoeve), hal : 3673

Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*) karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan berbagai macam barang/jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang/jasa (alat penunjuk harga). Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran.

Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai (*valuta*) karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang.

Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai **fungsi turunan**. Fungsi turunan itu antara lain uang sebagai alat pembayaran, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun atau pemindah kekayaan (modal), dan alat untuk meningkatkan status sosialnya.

A UANG PADA MASA HINDIA BELANDA

Mungkin ada yang bertanya kapankah mata uang mulai diciptakan dan digunakan sebagai alat tukar di Indonesia? Mata uang itu sebenarnya baru diciptakan sejak terjadi peristiwa jual beli yang semakin rumit. Perdagangan dalam bentuknya yang sederhana adalah saling bertukar barang, disebut juga barter, antara kedua belah pihak.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan barang maka perdagangan menjadi semakin ramai karena setiap orang pada dasarnya tidak hanya membutuhkan satu jenis barang melainkan berbagai macam barang (misalnya beras, garam, gula, minyak, dsb). Tetapi di kemudian hari timbul masalah bagaimana kalau berdagang dalam jumlah besar, apalagi nilai suatu barang tidak sama dengan barang lain. Misalnya satu pikul garam mungkin baru setara nilainya dengan satu karung beras. Jadi seandainya pertukaran barang atau barter ini terjadi dalam jumlah besar, kedua pihak bakal menemui kesulitan membawa barangnya masing-masing. Belum lagi jarak yang ditempuh dan tenaga yang dibutuhkan. Oleh karena sistem barter lama-lama

dianggap tidak praktis maka orang mulai memikirkan alat penukar barang yang praktis, mudah dibawa, tahan lama dan dapat digunakan sesuai kebutuhan. Demikianlah mata uang mulai diciptakan. Dari hasil penelitian mata uang yang pernah beredar dan berlaku di Indonesia dapatlah disusun sejarah perkembangan mata uang Indonesia yaitu : Masa Klasik (Hindu-Budha : abad V – XV), Masa Islam (abad XIII – XIX), Masa Kolonial (abad XVI – XX), Masa Kemerdekaan Indonesia (mulai tahun 1945).⁵

1. Masa Klasik (Hindu-Budha: abad V-XV)

Sejalan dengan mulai dikenalnya pelayaran (lalu lintas di laut dan sungai) maka perdagangan tidak hanya dilakukan di satu tempat saja melainkan sudah menjangkau ke tempat-tempat lain yang jauh, yang terpisah oleh lautan atau sungai. Sebagai akibatnya terjadilah perdagangan antar pulau dan antar negara. Letak geografis kepulauan Indonesia yang menguntungkan menjadikan kepulauan Indonesia sebagai salah satu cabang jalan pelayaran perdagangan internasional pada jaman purba.

Hubungan dagang dengan India mengakibatkan terjadinya perubahan dalam bermasyarakat, terutama tata negara, di sebagian daerah Indonesia sebagai akibat penyebaran agama Hindu dan Budha. Inilah yang kemudian melatari munculnya kerajaan-kerajaan kuna yang bercorak Hindu-Budha seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram, Kadiri, Singhasari dan Majapahit, dalam kurun waktu abad V hingga abad XV.

Bukti bahwa kepulauan Indonesia pernah dikunjungi pedagang-pedagang asing dapat diketahui dari sumber-sumber tertulis seperti prasasti dan kronik (catatan perjalanan) asing. Di dalam sebuah prasasti yang dikeluarkan oleh penguasa kerajaan Sriwijaya (abad ke-7) dijumpai istilah dalam bahasa Sansekerta, *vaniyaga*, artinya ‘saudagar’ atau pedagang’. Kata *vaniyaga* kemudian diserap menjadi kata bahasa Indonesia, *berniaga*, padanan kata dan ‘berdagang’.

Apa yang membuat pedagang-pedagang asing dari India, Cina, Kamboja, Vietnam, Srilangka, dan Arab datang ke Jawa dan pulau-pulau

⁵ [http // museum virtual.org](http://museum.virtual.org) dan [http//id.wikipedia](http://id.wikipedia)

lain di Indonesia? Tidak lain adalah barang-barang dagangan dari kepulauan Indonesia yang amat diminati oleh pedagang-pedagang asing tersebut antara lain cengkeh, pala, merica, kayu cendana, kapur barus, kain katun, garam, gula, gading gajah, cula badak, dan lain-lain. Sedangkan pedagang-pedagang dari kepulauan Indonesia biasanya mengimpor kain sutera, kain brokat warna-warni dan keramik.

Pedagang-pedagang asing tersebut ketika mengadakan transaksi jual-beli dengan penduduk lokal menggunakan alat tukar (uang) yang dibawa dari negerinya masing-masing. Akibatnya banyak mata uang asing dari berbagai negara beredar di kepulauan Indonesia. Hubungan dagang yang terjalin erat dengan India lambat laun mendatangkan ilham bagi penduduk lokal atau penguasa suatu kerajaan untuk membuat mata uang sendiri. Mata uang yang mereka buat sedikit banyak menyerupai mata uang di India baik dalam wujud maupun satuan nilainya.

Dahulu di Jawa orang menggunakan potongan-potongan emas dan perak sebagai mata uang, sebagaimana diberitakan oleh kronik Cina dari jaman Dinasti Song (960-1279). Uang itu dibuat apa adanya, berupa potongan-potongan logam kasar berbentuk setengah bulat, segi empat atau segitiga. Potongan-potongan logam emas dan perak itu kemudian diberi cap yang menunjukkan benda itu dapat digunakan sebagai alat tukar. Tanda tera atau cap pada uang kebanyakan berupa gambar sebuah jambangan dan tiga kuncup/kuntum bunga, atau tiga pucuk/tunas daun. Diperkirakan uang semacam ini sudah digunakan sejak abad VII.

Selain itu ada mata uang Jawa jaman Hindu-Budha yang berbentuk bundar seperti kancing baju, namanya uang Mā, singkatan dari māsa. Disebut demikian karena pada salah satu sisi (bagian yang cembung) ada tanda tera atau cap berupa huruf Nagari, huruf yang berasal dari India, berbunyi mā. Sedangkan pada sisi yang lain (bagian yang cekung) terdapat cap bergambar bunga berkelopak empat. Ada juga uang Ma dengan cap huruf Jawa Kuna. Uang Ma tidak hanya ditemukan di Jawa melainkan juga di

Bali dan Sumatra, kebanyakan dibuat dari perak. Uang yang beratnya sekitar 2,4 gram ini sudah digunakan sejak abad IX.

Selain uang Mā juga banyak ditemukan uang emas yang bentuknya seperti butiran jagung dengan cap huruf Nagari berbunyi tā, singkatan dari tahl. Beratnya sama dengan uang Mā, yaitu 2,4 gram.

Mata uang māsa dan tahl agaknya terus digunakan sejak jaman kerajaan Mataram, Kadiri, Singhasari hingga awal munculnya kerajaan Majapahit. Tetapi pada jaman keemasan kerajaan Majapahit (abad XIV) justru yang banyak beredar adalah mata uang tembaga, kuningan dan timah. Di dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja Majapahit uang ma disebut pisis, yang pada masa-masa kemudian dikenal sebagai uang gobog. Istilah ‘gobog’ diberikan oleh masyarakat Jawa sekarang yang berarti tidak laku lagi.

Jadi, uang gobog adalah sebutan untuk uang lokal Majapahit dan kepeng Cina. Mengapa demikian? Karena pada abad XIV banyak pedagang Cina yang bermukim di wilayah kerajaan Majapahit. Mereka itu kebanyakan bermukim di Tuban dan Gresik, menjadi orang kaya di sana. Tidak sedikit penduduk pribumi yang menjadi orang kaya dan terpandang. Dalam transaksi perdagangan penduduk setempat menggunakan uang tembaga (kepeng) Cina dan berbagai dinasti. Keberadaan orang-orang Cina di kerajaan Majapahit inilah yang kemudian memberikan ilham bagi penduduk setempat untuk membuat mata uang tembaga yang menyerupai kepeng Cina, dikenal dengan sebutan uang gobog.

Hiasan pada satu atau kedua sisi uang gobog berupa relief manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tulisan dan lain-lain. Yang menarik di sini adalah gaya manusia yang digambarkan mirip wayang kulit. Bahkan di antaranya ada yang dapat dikenali dengan baik sebagai tokoh-tokoh dalam pewayangan seperti Gatutkaca, Semar dan Togog. Hiasan-hiasan pada uang gobog menggambarkan kehidupan masyarakat Majapahit masa itu seperti penggembala sapi, petapa, nelayan, pemburu banteng, peternak, penenun, bangsawan dan para pengiringnya, dan lain-lain.

Selain gambar, pada uang gobog juga tertera tulisan. Ada uang gobog dengan tulisan Arab yang dikenal sebagai “kalimat syahadat”, bunyinya *la ilaha ilallah, muhammad rasul allah* (tiada tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah). Sekitar lubang bundar terdapat hiasan yang menggambarkan pancaran sinar yang dikenal sebagai “sinar (matahari) Majapahit”.

Tulisan huruf Arab pada uang gobog mi adalah suatu bukti bahwa agama Islam telah dianut oleh sebagian masyarakat kerajaan Majapahit yang mayoritas beragama Hindu dan Budha. Bahwa masyarakat Majapahit bersikap penuh toleransi terhadap agama Islam ditunjukkan dan banyaknya makam Islam di dekat ibukota kerajaan Majapahit sendiri, yaitu desa Sentonorejo, Trowulan, Jawa Timur. Mungkin uang gobog seperti ini juga dimaksudkan sebagai media penyebaran agama Islam di samping cara-cara lain seperti lewat dakwah atau pertunjukan seni.

Kegunaan uang-uang tersebut di atas sebagai alat pembayaran dalam jual beli tanah, gadai-tebus tanah, utang piutang, denda-denda sebagai akibat pelanggaran hukum, juga digunakan sebagai benda sesaji, bekal kubur bahkan amulet/ajimat.

2. Masa Islam (abad XIII-XIX)

Masa Islam adalah masa perkembangan agama Islam di Indonesia dan munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di berbagai daerah dan abad XIII hingga abad XIX. Umumnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia letaknya tidak jauh dari pelabuhan yang memungkinkan masyarakatnya dapat berhubungan dengan pedagang-pedagang asing, khususnya dari Timur Tengah.

Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai di daerah Aceh, berdiri pada akhir abad XIII. Kemudian bermunculan kerajaan-kerajaan Islam lain seperti Aceh Darusalam, Palembang, Jambi, Banten, Cirebon, Demak, Surakarta, Sumenep, Banjarmasin, Pontianak, Gowa, Buton dan Ternate-Tidore. Beberapa dari kerajaan-kerajaan Islam tersebut akhirnya berada di bawah peminintah kolonial Belanda dan Inggris.

Ciri-ciri umum mata uang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia adalah bertuliskan nama-nama penguasa yang lajim disebut sultan dan tahun Hijrah dalam tulisan Arab atau Jawa (Arab-Melayu). Di kerajaan Samudra Pasai dan Aceh Darusalam mata uang yang dibuat dari emas disebut derham. Derham tertua berasal dari Sultan Ahmad Malik az-Zahir yang memerintah sekitar tahun 1297-1327. Selain uang emas kerajaan Aceh Darusalam juga mengeluarkan uang timah yang disebut kasha.

Sementara itu kerajaan Palembang juga mengedarkan uang dari tembaga dan timah. Ada dua macam mata uang dari kerajaan yaitu mata uang yang berlubang di tengah, disebut juga piti teboh, dan mata uang tanpa lubang, disebut piti buntu. Menurut kebiasaan orang Palembang, piti teboh lajimnya dirangkai dengan seutas rotan. Satu rangkai piti teboh terdiri dari 500 keping uang, disebut satu cucub atau setali. Sedangkan piti buntu ditempatkan dalam kantong yang dibuat dari daun nipah disebut kupat. Tiap kupat berisi 250 keping piti buntu. Mata uang tersebut kebanyakan dibuat pada masa pemerintahan Sultan Najamuddin (abad XVIII).

Masih di sekitar wilayah Sumatra Selatan, yaitu di pulau Bangka, sejak dahulu menjadi tempat imigran orang-orang Cina. Komunitas Cina ini mendirikan kongsi-kongsi yang bergerak dalam usaha pertambangan timah. Masing-masing pimpinan perusahaan timah ini mengedarkan mata uang yang berlaku di lingkungannya. Oleh karena itu pada mata uangnya dicantumkan nama kongsi (dalam huruf Cina) dan pengusaha timah itu. Uang timah yang disebut kasha ini beredar pada abad XVIII.

Sementara itu di Jawa berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti di Banten, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta dan Madura. Kerajaan Banten pernah mengedarkan mata uang kasha dari tembaga, pada salah satu sisi ada tulisan huruf Arab atau Jawa berbunyi pangeran ratu ing banten, gelar Sultan Maulana Muhammad yang memerintah di Banten pada tahun 1580-1596.

Sultan yang memerintah kerajaan Cirebon pernah mengedarkan mata uang yang pembuatannya dipercayakan kepada seorang Cina. Uang timah yang amat tipis dan mudah pecah ini berlubang segi empat atau bundar di tengahnya, disebut picis, dibuat sekitar abad ke-17. Sekeliling lubang ada tulisan Cina atau tulisan berhuruf Latin berbunyi CHERIBON.

Kerajaan Sumenep di Madura mengedarkan mata uang yang berasal dari uang-uang asing yang kemudian diberi cap bertulisan Arab berbunyi '*sumanap*' sebagai tanda pengesahan. Uang kerajaan Sumenep yang berasal dari uang Spanyol disebut juga real batu karena bentuknya yang tidak beraturan. Dulunya uang perak ini banyak beredar di Mexico yang kemudian beredar juga di Filipina (jajahan Spanyol). Di negeri asalnya uang ini bernilai 8 Reales. Selain uang real Mexico, kerajaan Sumenep juga memanfaatkan uang gulden Belanda dan uang thaler Austria.

Kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan utamanya adalah Pontianak, Banjarmasin dan Maluku (Kalimantan Selatan). Kerajaan-kerajaan ini mengedarkan uang tembaga yang disebut duit. Kerajaan Banjarmasin mengedarkan uang dengan memanfaatkan mata uang 'duit' VOC yang salah cetak. Kesalahan cetak ini dapat dilihat dari tulisan VOC dan angka tahun yang terbalik. Tetapi pada sisi yang lain terdapat gambar perisai dengan tulisan Arab berbunyi 'banjarmasin'.

Di daerah Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, berdiri kerajaan Gowa dan Buton. Kerajaan Gowa pernah mengedarkan mata uang dan emas yang disebut jingara, salah satunya dikeluarkan atas nama Sultan Hasanuddin, raja Gowa yang memerintah dalam tahun 1653-1669. Di samping itu beredar juga uang dan bahan campuran timah dan tembaga, disebut kupa.

Kerajaan Buton di Sulawesi Tenggara lebih unik lagi, mengedarkan sejenis uang dan katun yang disebut kampua atau bida. Uang katun ini konon dibuat atau ditenun oleh puteri-puteri keraton di bawah pengawasan Menteri Besar. Setiap tahun coraknya dibuat berbeda untuk mencegah pemalsuan. Siapa saja yang berani meniru atau memalsukan uang kampua

ini diancam hukuman mati. Uang ini beredar sampai ke daerah Sulawesi Selatan dan Maluku hingga akhir abad XIX.

3. Masa Kolonial (abad XVI-XX)

Masa kolonial yaitu masa ketika banyak bangsa asing, terutama bangsa-bangsa Eropa, menjelajah ke berbagai penjuru dunia (Asia, Afrika, Amerika dan Australia) untuk dijadikan koloni atau tanah jajahan mereka. Bangsa-bangsa asing yang pernah menjajah Indonesia adalah Belanda, Inggris, Portugis dan Jepang. Masa ini berlangsung dari abad ke-16 sampai abad ke-20, dan dapat dirinci menjadi :

a. Masa Kolonial Belanda

- Kompeni Belanda (VOC) tahun 1602 – 1799
- Republik Batavia tahun 1799 – 1806
- Louis Napoleon (Belanda di bawah kekuasaan Perancis) tahun 1806 – 1811
- Kerajaan Belanda tahun 1816 – 1942
- Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA) tahun 1945 – 1949

b. Masa Kolonial Inggris

- Kompeni Inggris (EIC) di Jawa tahun 1811 – 1816

c. Masa Pendudukan Jepang tahun 1942 – 1945

d. Masa Kolonial Portugis (di Timor Timur) abad XVI – 1975

Bangsa-bangsa tersebut, kecuali Jepang, pada mulanya datang ke Indonesia bermaksud untuk berdagang. Tetapi lama-lama mereka menguasai tanah dan menjajah daerah-daerah di Indonesia.

Pada awal abad XVI, pedagang-pedagang Portugis memperkenalkan serta mengedarkan uang yang disebut *mat* atau *pasmal* dan real yang dibuat dari perak. Bangsa ini pernah menguasai separo daratan di Pulau Timor, tahun 1975 – 1999 pernah menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia sebagai propinsi Timor Timur (propinsi ke-27). Sejak tahun 2000, Timor Timur memerdekakan diri di bawah pengawasan PBB, dan merdeka penuh tahun 2004 dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Selama

Timor Timur menjadi koloni Portugal, pemerintah kolonial pernah memberlakukan mata uang dengan satuan centavos dan escudos.

Kemudian pada akhir abad XVI armada kapal dagang Belanda mendarat di Pulau Jawa. Pada tahun 1602 mereka mendirikan persekutuan dagang di Hindia-Timur, dikenal dengan nama VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) atau Kompeni Belanda. Tujuan mereka di Indonesia adalah merebut Sunda Kelapa untuk dijadikan pusat kegiatan kompeni. Sunda Kelapa kemudian diganti namanya menjadi Batavia. Dari sini Kompeni Belanda mulai menjalankan siasatnya yaitu mengusir orang-orang Portugis dan merebut beberapa daerah pelabuhan penting bagi sektor perdagangan. Pada masa Kompeni Belanda banyak beredar mata uang dengan berbagai satuan nilai seperti schelling, dukat, dukatoon, doit, stuiver, rijksdaalder, gulden, dan sebagainya. Mata uang tersebut dicetak di propinsi-propinsi di negeri Belanda dan Indonesia, terutama di Batavia.

Ketika Kompeni Belanda mengalami kesulitan memperoleh bahan baku logam untuk membuat mata uang, dicari alternatif lain untuk mencetak uang kertas yang menyerupai kertas berharga (sertifikat). Menjelang runtuhnya VOC (1799) dibuat semacam uang darurat dari potongan-potongan batangan tembaga berbentuk persegi empat yang dicetak di Batavia, disebut uang bonk.

Setelah VOC bubar Indonesia di bawah kendali pemerintahan Republik Batavia (1799 — 1806), mengikuti situasi di negeri Belanda, karena pada waktu itu pengaruh Revolusi Perancis (1789) sampai ke negara-negara Eropa, termasuk Belanda. Revolusi Perancis mengubah sistem monarki (kerajaan/kekaisaran) menjadi republik. Mata uang keluaran masa ini dicirikan dengan tulisan “INDIÆ BATAVORUM”, dengan satuan nilai gulden dan stuiver.

Kemudian, tahun 1806 — 1811 di Indonesia beredar uang logam yang dibubuhi tulisan inisial LN, demikian juga pada kertas-kertas berharga diberi cap bertulisan LN, singkatan dari ‘Louis Napoleon’. Louis Napoleon adalah adik kaisar Perancis, Napoleon Bonaparte, yang amat

terkenal dalam sejarah Perancis. Ia diangkat oleh kaisar menjadi raja di Belanda. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau mata uang keluaran masa ini menampilkan wajah Louis Napoleon, baik yang berlaku di Belanda maupun Indonesia. Satuan nilainya adalah gulden, rijksdaalder, doit dan stuiver.

Pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia, khususnya di Jawa (1811-1816), beredar berbagai macam mata uang yang dibuat dari emas, perak, tembaga dan timah. Salah satu yang dikenal adalah 'Ruppee Jawa' yang pada kedua sisinya tertera tulisan huruf Jawa dan Arab.

Jauh sebelum ini, mata uang Kompeni Inggris dengan monogram UEIC (*United East India Company*) telah beredar di daerah-daerah di Sumatra, contohnya Bengkulu, sejak tahun 1783 dengan satuan nilai suku dan keping.

Masa pemerintahan Inggris di Jawa tidak berlangsung lama. Pada tahun 1816 pemerintahan diserahkan kembali kepada kerajaan Belanda, dengan demikian Indonesia kembali menjadi jajahan Belanda yang pada waktu itu disebut Hindia-Belanda (*Nederlandsch-Indië*).

Pada masa itu pemerintah Hindia-Belanda menghadapi berbagai perlawanan dari penguasa-penguasa lokal di Indonesia sehingga terjadilah perang, di antaranya adalah Perang Diponegoro (1825-1830) di Jawa Tengah, Perang Paderi (1821- 1837) di Sumatra Barat, dan Perang Aceh (1873-1903). Perang tersebut menelan biaya yang sangat besar, yang mengakibatkan kas keuangan negeri Belanda menjadi kosong.

Pemerintah Hindia-Belanda berusaha mengisi kas dengan berbagai cara, antara lain menjual beberapa lahan tanah kepada perusahaan partikelir (swasta) yang membuka usaha perkebunan. Pemilik perkebunan selain orang Belanda sendiri juga orang-orang asing seperti Cina, Arab, Jerman, Inggris, Perancis dan Jepang. Mereka membuka usaha perkebunan teh, kopi, tembakau, tebu, dan karet, tersebar di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Untuk membayar gaji buruh yang bekerja di perkebunannya, mereka menciptakan uang yang disebut 'token

perkebunan', semacam alat tukar yang hanya beredar dan berlaku di tempat tertentu, seperti token untuk perkebunan teh, token untuk perkebunan tembakau, dan sebagainya. Token perkebunan yang pernah beredar di Indonesia bentuknya sangat unik, ada yang berbentuk segitiga, segilima, segienam, bahkan berbentuk seperti mata. Bahannya selain logam dan kerfas, juga dari bambu.

Cara lainnya, Belanda menciptakan "tanam paksa" atau kultuurstelsel, yaitu rakyat Indonesia dipaksa menanam tebu, kopi, karet dan teh yang sangat laku di pasaran internasional. Dengan cara ini Belanda memperoleh pemasukan uang yang sangat besar, tetapi sebaliknya rakyat Indonesia sangat menderita.

Pada masa itu satuan mata uang yang beredar adalah gulden dan cent, dengan nilai-nilainya yang dikenal dengan istilah ringgit ($2\frac{1}{2}$ Gulden/Rupiah), suku (50 Sen), tali (25 Sen), ketip atau picis (10 Sen), kelip (5 Sen), dan benggol atau gobang ($2\frac{1}{2}$ Sen). Selain uang logam dicetak pula uang kertas keluaran De Javasche Bank, inilah bank pertama yang berdiri di Indonesia pada abad XIX, sekarang menjadi Bank Indonesia.

Pada pertengahan abad XX terjadi Perang Dunia II dan Jepang muncul sebagai kekuatan baru di Asia. Bala tentara Jepang menduduki wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada tahun 1942 Jepang berhasil menduduki Indonesia, Dalam waktu singkat pemerintah Hindia-Belanda dibuat bertekuk lutut di bawah tentara pendudukan Jepang. Pada masa itu uang kertas yang beredar pertama kali tertera tulisan dalam bahasa Belanda dengan satuan gulden, oleh karena itu disebut "Gulden Jepang". Ketika pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda maka dibuatlah uang kertas dengan tulisan bahasa Indonesia dan Jepang (huruf Kanji) dengan satuan rupiah. Oleh karena itu uang ini disebut "Rupiah Jepang".

Semua uang kertas keluaran pemerintah pendudukan Jepang ini tidak ada nomor seri dan tanda tangan Menteri Keuangan, Gubernur Bank atau

Direktur Bank, jadi tidak seperti lazimnya uang kertas sekarang. Namun demikian uang pendudukan Jepang ini berlaku terus sampai beberapa saat setelah Jepang menyerah kalah (tahun 1945).⁶

B. ALAT TUKAR MASA PENDUDUKAN JEPANG

Awal tahun 1942 tentara Jepang telah memasuki wilayah Hindia Belanda. Tentara Belanda dengan sekitar 4 divisi kurang lebih 40.000 Orang⁷ harus menghadapi tentara Jepang yang jumlahnya tidak sebanding yaitu sekitar 6-8 divisi. Dalam pertempuran yang tidak seimbang tersebut menyebabkan pertempuran yang tidak berlangsung lama. Secara bertahap pula Jepang berhasil menduduki Tarakan Kalimantan Timur kemudian Balikpapan, Pontianak dan akhirnya sampai di wilayah Banjarmasin. Usaha Jepang untuk menguasai wilayah Indonesia yang pada saat itu menjadi daerah jajahan bangsa Belanda tidak hanya berhenti sampai disini, usaha menaklukkan wilayah jajahan Hindia Belanda ini terus dilakukan sampai akhirnya ke Pulau Jawa. Pada awal tahun 1942. Seperti halnya pada saat menaklukkan wilayah Kalimantan, dalam menaklukkan Pulau Jawa pun Jepang tidak mendapatkan perlawanan yang berarti. Sehingga dalam waktu yang relative tidak lama Pulau Jawa dapat dikuasai. Dalam usahanya untuk menguasai Jawa, diawali dari kota Bandung, Jepang mendaratkan satu detasemen dengan kekuatan 5.000 orang.⁸ Pada kesempatan tersebut pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang berhasil menduduki 3 wilayah di Jawa sekaligus. Daerah tersebut adalah Banten, Eretan Wetan, Jawa Barat dan Kragan Jawa Tengah. Dengan berhasilnya dikuasai wilayah Jawa oleh tentara Jepang maka pada tanggal 7 Maret 1942 Jenderal Ter Poorten menyatakan menyerah pada Jepang di Kalijati Lembang. Dengan penyerahan Belanda pada Pemerintah Jepang tersebut dapat diartikan bahwa kekuasaan Belanda atas Indonesia runtuh dan mulai saat itu Indonesia berada dibawah kekuasaan Jepang.

⁶Museum virtual <http://www.museum-virtual.org>

⁷<http://www.rumahuang.com/sejarah-mata-uang-indonesia>

⁸Notosusanto Nugroho, Sejarah Nasional Indonesia jilid VI, Balai Pustaka, Jakarta, 1993 hal 3

1. Awal Pendudukan Jepang di Indonesia.

Pada pertengahan abad 20 terjadi perang Dunia II dan Jepang muncul sebagai kekuatan baru di Asia. Bala tentara Jepang tanpa perlawanan yang berarti berhasil menduduki wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang waktu itu dibawah colonial Belanda dapat dikuasai Jepang pada tahun 1942. Indonesia dapat dikuasai oleh bala tentara Jepang tidak memakan waktu lama. Setelah Jepang berhasil menduduki wilayah kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia dan Belanda telah menyatakan diri menyerah kepada Jepang di Kalijati Lembang Jawa Barat, mulailah babak baru penindasan bangsa Indonesia oleh bangsa Jepang.

Pada awalnya kedatangan bangsa Jepang masuk di Indonesia disambut dengan baik, senang, gembira, oleh rakyat Indonesia. Propaganda Jepang yang datang dengan mengaku sebagai saudara tua, dan Nippon pembebas Asia dengan janji-janjinya telah membius rakyat Indonesia, dengan harapan bangsa Indonesia akan segera terbebas dari penjajahan bangsa asing (Belanda) dan akan menjadi Negara yang merdeka. Jepang masuk di Indonesia disambut dengan gembira oleh rakyat. Peristiwa ini juga terjadi di Yogyakarta Jepang yang datang dari arah Solo berjalan menuju Yogyakarta tanpa mendapat perlawanan dari rakyat. Akan tetapi penjajah tetaplah penjajah yang bertujuan untuk mengeksploitasi wilayah jajahannya demi kepentingan negaranya. Seperti halnya Jepang yang datang di Indonesia dengan sejumlah janji yang sebenarnya hanya untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia. Semboyan 3A dan pengakuan saudara tua yang digembar-gemborkan oleh Tentara Jepang sebenarnya hanya tipuan Jepang saja. Hal ini dilakukan untuk menarik hati rakyat agar mereka diterima oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama, kenyataannya Jepang tetaplah penjajah seperti penjajah bangsa lain yang mengeruk kekayaan bangsa jajahannya untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan industri bangsanya. Apalagi pada saat itu bangsa Jepang sedang menghadapi perang Asia

Timur Raya. Sehingga sumber-sumber kekayaan bangsa Indonesia dieksploitasi untuk mendanai perang tersebut, bahkan system perekonomian diatur oleh Jepang. Sumber-sumber ekonomi diawasi secara ketat. Selain kekayaan alamnya, banyak rakyat yang dikerahkan menjadi romusha untuk memenuhi kebutuhan logistic dan melaksanakan proyek-proyek yang dikembangkan Jepang sebagai sarana dan prasarana perang seperti proyek pembuatan gua-gua tempat persembunyian tentara Jepang dan lain sebagainya. Berarti kedatangan Jepang ke Indonesia yang mengaku sebagai saudara tua adalah suatu kebohongan, Jepang tetaplah penjajah yang ingin menanamkan kekuasaannya.

Sebenarnya masuknya bangsa Jepang ke wilayah Indonesia sudah di prediksi oleh Presiden De Javasche Bank (DJB) yang pada saat itu dipegang oleh Dr. G.G van Bittingha Wichers. Beliau memiliki prediksi bahwa melihat kekuatan tentara Jepang pada perang Asia Pasifik pasti Jepang akan memperluas pengaruhnya sampai ke wilayah Asia termasuk Indonesia. Ternyata prediksi dari Dr. G.G. Buttingha tersebut tidak meleset, dan benar tidak membutuhkan waktu yang lama Jepang telah berhasil menguasai wilayah Indonesia. Dengan masuknya bangsa Jepang ke wilayah Hindia Belanda tentunya akan merubah system yang selama ini diterapkan oleh bangsa Belanda termasuk dalam bidang perekonomian.

Untuk menghadapi kemungkinan tersebut maka Dr. G.G Van Buttingha segera menyusun siasat untuk mengantisipasi masuknya imperium Jepang ke wilayah Indonesia. Untuk mengantisipasi meluasnya kekuasaan Jepang ke wilayah Indonesia maka diambil tindakan yaitu :

- a. Memindahkan cadangan emasnya ke Australia dan Afrika Selatan.
- b. Pemandahan ini dilakukan melalui pelabuhan Cilacap bertujuan agar DJB tetap dapat menjalankan perekonomian kembali setelah perang usai.
- c. Selain itu Pemerintah Hindia Belanda juga tetap meminta agar Bank-bank terus melanjutkan menjalankan kegiatan perekonomian perbankan

walaupun dengan segala keterbatasan yang disebabkan oleh situasi dan kondisi sehingga tidak terjadi kelumpuhan kegiatan perekonomian.

Tindakan dari Buttingha ternyata membawa hasil oleh karena tidak lama setelah itu tepatnya akhir Februari 1942 kekuasaan Jepang semakin meluas atas Hindia Belanda. Melihat kondisi ini maka Gubernur Jenderal DJB beserta pejabat tinggi mengungsi ke daerah yang dianggap lebih aman. Kota yang menjadi pilihan untuk mengungsi adalah kota Bandung. Pemilihan kota ini adalah karena Bandung dihuni oleh banyak penduduk sipil, anak-anak dan wanita. Dengan latar belakang kondisi tersebut maka didapat kesepakatan antara Belanda dan Jepang bahwa tidak akan melakukan pertempuran di wilayah dengan latar belakang seperti tersebut diatas. Dengan ditetapkan Bandung sebagai daerah bebas pertempuran maka diputuskan pula DJB pindah ke Bandung dan dijadikan pusat perbankan. Akan tetapi keadaan seperti ini juga tidak berlangsung lama. Hindia Belanda semakin terdesak dan akhirnya tidak mampu mempertahankan daerah kekuasaannya di Indonesia termasuk Bandung yang juga dapat dikuasai oleh Balatentara Jepang. Dengan demikian maka para tokoh dan pejabat DJB pun harus meninggalkan kota Bandung menuju Negara yang bebas yaitu Australia. Ikut dalam rombongan tersebut adalah Dr. R.E Smitt seorang direktur DJB. Dari beliau diharapkan dapat membangun dan memelihara hubungan dengan perbankan dunia Internasional. Sehingga nantinya jika Indonesia dapat dikuasai kembali DJB dapat eksis di wilayah Hindia Belanda kembali.

2. Masa Pendudukan Jepang.

Dengan menyerahnya Hindia Belanda di Kalijati, maka seluruh system pemerintahan diambil alih Jepang sebagai penguasa baru di Hindia Belanda.(Indonesia). Hal ini juga berlaku dengan keberadaan DJB. Pada saat itu Jepang juga segera memerintahkan agar pemerintah Hindia Belanda segera menyerahkan semua aset-aset bank kepada tentara pendudukan Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia mulai tahun 1942 telah menghentikan kegiatan DJB yang telah menjadi roda

perekonomian pada masa kolonial Hindia Belanda Bank-bank bekas milik Belanda yaitu De Javasche Bank, Nederlandsche Handels Maatschappij, Nederland-Indische Escompto Bank, dan Bank-bank milik Inggris dan bank asing lainnya dilikwidasi dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya sampai dengan 20 November 1942.⁹ Selanjutnya beban dan tugas perbankan digantikan oleh bank-bank milik Jepang Yokohama Ginko, Mitsui Ginko, Taiwan Ginko, dan Kan Ginko yang semuanya berada dibawah pengawasan supervise Nanpo Keihatsu Kenso (perbendaharaan untuk kemajuan wilayah selatan).¹⁰

Dalam bidang moneter, pada masa pendudukannya di Indonesia, Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai gulden dan rupiah yaitu mata uang yang digunakan pada masa pemerindahan Hindia Belanda. Tujuan Jepang mempertahankan mata uang gulden dan rupiah adalah agar semua asset di wilayah Hindia Belanda dapat dipertahankan seperti sebelum perang berkobar yang akhirnya wilayah Hindia Belanda dapat dikuasai oleh Jepang. Selain itu juga agar Jepang dapat mengawasi lalu lintas permodalan dan arus kredit. Sehingga dengan pertimbangan tersebut maka oleh pemerintah Jepang mata uang gulden dan rupiah tetap digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Akan tetapi Jepang juga mengeluarkan mata uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang dan juga merupakan alat tukar yang sah. Pada awal Maret 1942 Pemerintah Dai Nippon mengeluarkan uang kertas Jepang yang disebut dengan uang invasi atau uang militer (gunpyo). Mata uang ini dicetak tidak menggunakan angka tahun, menampilkan gambar pohon pisang dibagian muka sehingga juga dikenal dengan “Banana Money”. Oleh karena Indonesia pada saat itu merupakan wilayah jajahan Belanda, maka uang yang disiapkan oleh pemerintah Jepang sebelum masuk ke Indonesia menggunakan bahasa Belanda. Mulai tanggal 11 Maret 1942 dengan

⁹ Notosusanto, Nugroho, Sejarah Nasional Indonesia, Jakarta, balai Pustaka, hal 44

¹⁰ Ibid, hal 44

undang-undang No. 1 Bala tentara Jepang diumumkan bahwa uang yang diedarkan oleh pemerintah Dai Nippon tersebut berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di daerah pendudukan Jepang. Akan tetapi pemerintah Jepang tidak mencabut berlakunya uang-uang pada masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu uang De Javasche Bank dan uang Pemerintah Hindia Belanda.

Dengan demikian pada masa pendudukan Jepang di Indonesia mata uang yang beredar ada empat macam mata uang yaitu :

- a. Uang sisa Kolonial Belanda De Javasche Bank dengan nominal 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 dan 1000 gulden. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia Jepang tidak mengeluarkan undang-undang yang melarang mata uang yang telah beredar pada masa colonial Belanda.
- b. Mata uang yang sudah dipersiapkan sebelum Jepang menguasai wilayah Indonesia. Mata uang ini menggunakan bahasa Belanda De Japansche Regeering dengan satuan gulden, emisi 1942 dan berkode "S". uang inilah yang disebut dengan invansion money. Tujuan dikeluarkan mata uang ini adalah untuk menghancurkan nilai mata uang Belanda yang sudah terlanjur beredar di Hindia Belanda. Nominal mata uang ini adalah 1 cent, 5 cent, 10 cent, ½ gulden, 1 gulden, 5 gulden dan 10 gulden.
- c. Mata uang yang menggunakan bahasa Indonesia "Pemerintah dai Nippon" emisi 1943, dengan pecahan yang bernilai 100 rupiah. Sebenarnya pada saat itu juga telah dicetak mata uang dengan nilai 1000 rupiah akan tetapi uang tersebut belum sempat diedarkan.
- d. Mata uang yang menggunakan bahasa Jepang "Dai Nippon Teikoku Seibu" emisi tahun 1943, gambar wayang Gatotkaca dengan nilai 10 rupiah dan mata uang kertas gambar rumah minang dengan nilai 5 rupiah, pecahan ½ rupiah dan 1 rupiah.

Dengan dicetaknya mata uang dengan menggunakan bahasa Indonesia dan menampilkan budaya bangsa Indonesia sebenarnya adalah salah satu cara Jepang menarik simpati rakyat Indonesia. Memang, pada

awal pendudukan Jepang memberikan banyak kelonggaran-kelonggaran yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia. Salah satu kelonggaran tersebut dengan dicetaknya mata uang yang menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan gambar yang mengambil dari budaya Indonesia. Dengan beredarnya mata uang Pemerintah Jepang tetapi mata uang masa Kolonial Belanda tetap diberlakukan menyebabkan uang yang beredar di masyarakat tidak dapat dikendalikan. Sehingga pada waktu itu jumlah uang yang beredar mencapai 4 milyar. Jumlah ini masih ditambah lagi pada saat sekutu berhasil menguasai kota-kota besar di Indonesia, mereka mngedarkan mata uang cadangan untuk memenuhi kebutuhan operasional selama di Indonesia. mata uang yang diedarkan sekutu mencapai 2,3 milyar.¹¹ Hal ini yang memicu terjadinya inflasi yang tinggi pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia nantinya.

Ternyata kekuasaan Jepang di Indonesia tidak berlangsung lama, pada tahun 1944 Jepang berhasil dihalau oleh tentara Amerika dan pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Peristiwa tersebut terjadi begitu cepat. Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu berarti berakhir sudah kekuasaan Jepang terhadap Indonesia. Selanjutnya kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia menjadi Negara yang merdeka dimulai pula babak baru tentang sejarah mata uang dengan dikeluarkan mata Oeang Republik Indonesia (ORI). Namun demikian pada awal kemerdekaan mata uang Jepang masih digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Keadaan ini berlangsung hingga bangsa Indonesia berhasil mencetak mata uang sendiri dan ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah pada tanggal 30 Oktober 1946.

¹¹ Keadaan Ekonomi keuangan pada masa awal Kemerdekaan Interne.

BAB III

OEANG REPOEBLIK INDONESIA (ORI) ALAT REVOLUSI

A. Kondisi Sosial Ekonomi Pada Masa Awal Kemerdekaan

Kemerdekaan yang berhasil diraih oleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, akan tetapi ada alat juang lain yang cukup ampuh dan merupakan tanda eksistensi keberadaan sebuah negara. Alat juang tersebut tidak lain adalah uang rupiah. Menurut Mohammad Hatta, uang adalah tanda kemerdekaan suatu negara. Mempunyai percetakan dan uang sendiri juga merupakan tindakan politis guna memantapkan identitas bangsa dan negara. Suatu negara merdeka tidak hanya cukup dengan proklamasi, mempunyai pemerintahan, tanah air, dan rakyat, tetapi juga harus mempunyai mata uang sendiri. Pernyataan tersebut kemudian menjadi dasar pemikiran bagi pencetakan uang republik.¹ Tak heran jika sejarah perjuangan merebut dan mengisi kemerdekaan Indonesia, sedikit-banyak, langsung ataupun tidak, terkait dengan sejarah keberadaan uang Republik Indonesia.

Berbicara mengenai uang Republik Indonesia tentunya tidak bisa dilepaskan dengan masalah ekonomi yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada akhir pendudukan Jepang dan masa awal kemerdekaan. Pada saat itu, ekonomi Indonesia sangat kacau karena Indonesia yang baru saja merdeka belum mempunyai pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia serta belum mempunyai pola untuk mengatur ekonomi yang mantap. Selain itu, tinggalkan ekonomi pemerintah pendudukan Jepang memang buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang. Hal lain yang menjadi penyebab antara lain kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan

¹Mohammad Hatta, "Menoetoeop Masa Penderitaan dan Kesoekaran", *Kedaulatan Rakjat* tanggal 30 Oktober 1946.

ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional, dan sikap Belanda yang masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.²

Bangsa Indonesia juga menghadapi laju inflasi yang cukup tinggi. Sumber inflasi tersebut adalah beredarnya mata uang Jepang di masyarakat secara tak terkendali. Peredarannya diperkirakan mencapai 4 milyar rupiah Jepang. Bahkan sampai pada bulan Agustus 1945, mata uang Jepang yang beredar di Jawa saja berjumlah 1,6 milyar rupiah Jepang. Jumlah tersebut kemudian bertambah ketika pasukan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) datang dengan membonceng tentara Sekutu dan berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia. Pasukan NICA juga menguasai bank-bank dan percetakan G. Kolff (tempat mencetak uang Jepang), serta mengeluarkan uang cadangan yang diperkirakan berjumlah 2,3 milyar rupiah Jepang. Uang tersebut dihaburkan untuk tujuan operasi dan membiayai pembantu-pembantunya, seperti menggaji pegawai dalam rangka mengembalikan pemerintah Kolonial Belanda. Mereka menggaji para pegawainya berpuluh kali lipat dibandingkan para pegawai lain. Oleh karena itu, tidaklah heran jika para pegawai NICA dengan mudahnya membayar satu tandan pisang seharga f.200, sebutir telur seharga f.5, dan daging seharga f.50. NICA juga memborong bahan makanan dan barang kebutuhan sehari-hari yang menjadi kebutuhan pokok penduduk sehingga barang menjadi langka dan jika penduduk menginginkan barang yang sama harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit.³

²<http://rinanditya.webs.com/ekonomi19451959.htm> *Keadaan Ekonomi Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan 1945 Hingga 1950.*

³Dwi Ratna Nurhajarini, *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946-1950*, (Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1994), hlm. 12.

Berikut adalah tabel keadaan peredaran uang di Jawa dari masa akhir pendudukan Jepang sampai Bulan Desember 1945:⁴

1	Mata uang pendudukan Jepang yang beredar	1.600.000.000
2	Sisa dari pemerintah Hindia Belanda dan de Javasche Bank	300.000.000
3	Mata uang Jepang cadangan yang disita oleh NICA	2.000.000.000
	Jumlah	3.900.000.000

Dengan beredarnya mata uang tersebut di atas, keadaan ekonomi Republik Indonesia semakin bertambah merosot, karena harga barang-barang di pasaran meningkat dengan cepat, sementara jumlah barang kebutuhan yang ada sangat terbatas. Kelompok yang paling menderita karena inflasi adalah para petani sebab pada masa pendudukan Jepang petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah. Menghadapi situasi ekonomi seperti itu, pemerintah tidak bisa berbuat banyak dengan menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku karena pada saat itu negara belum memiliki mata uang sendiri sebagai gantinya. Untuk sementara waktu, kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintah adalah mengeluarkan maklumat tanggal 3 Oktober 1945, yaitu Maklumat Pemerintah RI No. 1/10 Tahun 1945 yang berisi tentang macam-macam uang yang berlaku sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Mata uang tersebut antara lain: mata uang de Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1942 yang terdiri dari uang kertas dan uang logam, serta mata uang pendudukan Jepang yang terdiri dari tiga macam, yaitu uang kertas Jepang yang memakai teks berbahasa Belanda, uang kertas Jepang yang berbahasa Jepang dan Indonesia, serta uang kertas Jepang yang berbahasa Indonesia.⁵

⁴Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid 6, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, h. 172-173.

⁵*Ibid.*, h. 14-15.

Terbatasnya persediaan barang karena inflasi diperparah dengan adanya blokade laut oleh Belanda yang pada awalnya dilakukan dengan dalih untuk:

1. Mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia
2. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya
3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.

Namun, tujuan sebenarnya dari blokade Belanda tersebut adalah untuk mencekik Indonesia secara ekonomi. Dengan blokade tersebut, Belanda mengharapkan terjadinya keadaan sosial-ekonomi yang buruk karena Indonesia kekurangan bahan-bahan impor yang dibutuhkan, jumlah penerimaan pajak dan bea masuk lainnya yang harus dibayar oleh importir juga menurun, sementara penerimaan negara boleh dikatakan kosong, dan pengeluaran negara semakin bertambah banyak. Dengan berbagai keadaan serba sulit tersebut, Belanda mengharapkan terjadinya kegelisahan dan keresahan sosial sehingga dapat menimbulkan kebencian rakyat terhadap pemerintah Republik.⁶

Menghadapi keadaan ekonomi yang sulit seperti itu, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, masyarakat mengubah pertukaran kebutuhan hidup yang pada awalnya merupakan fungsi sosial, kemudian diubah menjadi fungsi ekonomi, yaitu dengan nilai jual-beli. Semua orang yang biasa bekerja sebagai buruh ataupun pegawai negeri menjual barang miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di pinggir-pinggir jalan, di dekat pasar luar kota ataupun di tengah kota, banyak bermunculan pedagang-pedagang baru yang terdiri dari para pegawai negeri, anak sekolah dan kaum buruh. Mereka ada yang menjual makanan, tembakau, *klembak*, rokok, barang-barang rumah tangga, pakaian bekas, dan sebagainya. Pada saat itu, harga bahan makan terutama beras sangat mahal, sebaliknya bahan pakaian sangat merosot nilainya bila dibandingkan dengan nilai harga bahan makanan. Harga beras

⁶Marwati Djoened Poesponegoro, *op. cit.*, h. 174

tiap kilogram bisa mencapai \pm Rp 150 sampai dengan Rp 200. Kain batik yang halus terkadang hanya dapat ditukar dengan 10-15 kilogram beras.⁷

Kekacauan situasi ekonomi semakin diperparah dengan tindakan orang NICA yang mulai melancarkan aksinya dengan mengeluarkan uang baru terutama di daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Sekutu, baik di Jawa maupun di Sumatera. Mata uang baru ini lebih sering disebut dengan nama “uang NICA” atau uang merah. Uang NICA ini dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya sudah sangat menurun. Masyarakat yang tinggal di daerah pendudukan banyak mengalami kesulitan. Orang yang bekerja di daerah pendudukan menerima upah atau gaji dalam bentuk uang NICA, tetapi untuk berbelanja mereka perlu uang Jepang karena para pedagang, penjual beras, sayur, ikan, dan sebagainya hanya mau menerima uang Jepang yang merupakan uang sah RI dan menolak mentah-mentah uang NICA. Bagi mereka yang mau menerima uang NICA, akhirnya juga tidak bisa dibelanjakan di daerah pedalaman.⁸ Pemakaian uang NICA oleh sebagian masyarakat Indonesia umumnya bersifat paksaan. Rakyat tetap memakai uang Jepang sebagai alat pembayaran yang sah karena uang Jepang adalah uang kepercayaan masyarakat, meskipun nilainya sudah jatuh. Pada saat itu, kurs ditentukan 3% yaitu setiap f1. 1 uang Jepang dinilai sama dengan 3 sen uang NICA. Penggantian pemakaian mata uang Jepang menjadi uang NICA tersebut diumumkan sejak tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima AFNEI (Allied Forces in Netherlands Indie), Letjen Sir Montequé Stopford. Perdana Menteri RI, Sutan Sjahrir, segera memprotes tindakan tersebut karena secara terang-terangan NICA telah melanggar persetujuan yang telah disepakati bersama. Dalam persetujuan itu dinyatakan bahwa selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan dikeluarkan mata uang baru untuk menghindari kekacauan di bidang ekonomi dan keuangan. Sekali lagi,

⁷Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*, 1953, 411-412.

⁸Dwi Ratna Nurhajarini, *op. cit.*, h. 17.

pemerintah juga mengingatkan masyarakat bahwa di wilayah RI hanya berlaku tiga macam mata uang sebagaimana yang telah dinyatakan pada bulan Oktober 1945, sehingga rakyat dianjurkan untuk tidak menerima uang NICA sebagai alat pembayaran.⁹

Sebagai tindak lanjut, pemerintah baru bisa mengeluarkan mata uang sendiri pada tahun 1946 lewat Undang-undang No. 17/1946 tertanggal 1 Oktober 1946, yaitu tentang pengeluaran Oeang Republik Indonesia (ORI). Meskipun ORI telah keluar, dengan berbagai kekuatannya NICA tetap memaksa penduduk untuk memakai uang NICA sebagai alat pembayaran. Pada permulaannya, rakyat merasa ragu-ragu dan takut untuk menerima uang Belanda ini karena mengandung resiko yang sangat besar, yaitu siapa saja yang mau menerima dan menganggap laku uang musuh itu, oleh kalangan pejuang akan dianggap membantu stabilitas kedudukan Belanda di tanah air, selain itu juga dianggap sebagai pengkhianat bangsa dan hukumannya adalah diculik atau dibunuh. Akan tetapi, karena adanya tekanan moral dan ekonomi dari pihak Belanda, maka akhirnya secara diam-diam rakyat menerima uang Belanda atau uang Federal ini, disamping masih menggunakan ORI sebagai alat pembayaran yang sah. Uang Federal hanya dapat beredar di dalam kota dan untuk menentukan kurs uang Federal dibandingkan dengan ORI, penduduk telah menetapkan nilai 1 rupiah Federal sama dengan 100 rupiah ORI.¹⁰ Karena semakin pentingnya alat-alat pembayaran pada masa perjuangan, akhirnya timbullah tindakan-tindakan yang merugikan rakyat dari kedua belah pihak yang saling bermusuhan. Tindakan itu antara lain jika tentara Belanda mengetahui rakyat masih memegang atau menyimpan ORI, berapapun jumlahnya, uang tersebut akan dirampas dan dirobek-robek. Dengan adanya tindakan-tindakan itu, para gerilyawan kita juga melakukan balasan dengan merampas dan merobek-robek uang Federal yang berada di tangan rakyat.¹¹

⁹*Ibid.*, h. 16-17.

¹⁰Kementerian Penerangan, *op. cit.*, h. 414-415.

¹¹*Ibid.*, h. 415.

Melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan, ORI dinyatakan berlaku sebagai alat tukar yang sah pada tanggal 30 Oktober 1946 menggantikan mata uang Jepang. Pengeluaran ORI ditandai dengan pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta melalui corong RRI Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1946, sehari sebelum ORI beredar di masyarakat.¹² Kurs mata uang Jepang dengan ORI adalah satu per seribu, artinya setiap seribu rupiah mata uang Jepang ditukar dengan 1 rupiah ORI.¹³ Beberapa jam sebelum mata uang Jepang itu mati, banyak orang berlomba-lomba membelanjakan uang yang sedang sekarat itu dengan harga yang sangat tinggi. Misalnya, satu piring nasi dibeli dengan harga 50-100 rupiah Jepang, satu bungkus kacang dengan harga 25 rupiah Jepang, dan sebagainya. Keesokan paginya, uang kertas Jepang itu tinggal menjadi mainan anak-anak.¹⁴

Dengan keluarnya ORI yang pertama itu, pemerintah memberi modal kepada seluruh lapisan rakyat, baik kaya maupun miskin, pegawai negeri yang berpangkat tinggi maupun rendah, pedagang maupun buruh, setiap jiwa dibagi sama rata sebanyak 1 rupiah dan setiap kepala keluarga ditambah 3 sen. Beredarnya ORI juga membuat stabilitas harga bahan pokok di dalam negeri menjadi terjaga, seperti harga beras hanya 15 sen per kilogram dan 1 buah kelapa hanya 3-4 sen, meskipun stabilitas harga tersebut tidak bisa bertahan lama karena blokade ekonomi Belanda masih tetap berlangsung sehingga menghambat pemenuhan barang kebutuhan sehari-hari.¹⁵

B. ORI TERBIT DALAM MASA REVOLUSI

Empat-belas bulan setelah tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, atau tepatnya pada tanggal 30 Oktober 1946, mata uang resmi Pemerintah Republik Indonesia praktis baru terbit. Sejarah mencatat bahwa tanggal 30 Oktober 1946 adalah awal sejarah penerbitan uang RI ini sehingga tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai “Hari Keuangan”.

¹²Dwi Ratna Nurhajarini, *op. cit.*, h. 3

¹³Marwati Djoened Poesponegoro, *op. cit.*, h. ...

¹⁴Kementerian Penerangan, *op. cit.*, h. 408.

¹⁵*Ibid.*, h. 408

Pada saat itu Wakil Presiden RI pertama, Mohammad Hatta, berpidato di Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta mengantarkan lahirnya “Oeang Repoeblik Indonesia” (ORI) yang akan menggantikan uang kertas De Javasche Bank dan uang Jepang yang masih beredar saat itu. Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Surat Keputusan berlakunya ORI secara sah sejak 30 Oktober 1946 mulai pk. 00.00, serta penarikan uang Hindia Belanda dan uang pendudukan Jepang dari peredaran.

Penerbitan atau emisi pertama dari ORI ini yang mencantumkan tanggal pengeluaran “Djakarta, 17 Oktober 1945” dan ditanda-tangani oleh Menteri Keuangan waktu itu, Mr. A. A. Maramis, terdiri dari pecahan-pecahan 1 sen, 5 sen, dan 10 sen, selanjutnya dalam pecahan-pecahan rupiah dari ½ rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, dan 100 rupiah. Pada saat diterbitkannya nilai tukar 1 rupiah ORI sama dengan 50 rupiah uang Jepang di pulau Jawa, atau 100 rupiah uang Jepang di pulau Sumatera.

Sementara itu, sebagaimana dikemukakan di atas, mulai 30 Oktober 1946 Pemerintah RI telah mulai mengedarkan ORI. Uang ini dalam praktek hanya beredar di wilayah yang masih dikuasai Pemerintah RI. Dengan demikian maka terdapat wilayah-wilayah peredaran uang NICA dan ORI sendiri-sendiri. Perundingan demi perundingan antara NICA dan RI diselenggarakan dan mencapai kesepakatan, namun ambisi Belanda untuk bisa memperoleh dan menguasai kembali seluruh wilayah bekas Hindia Belanda tetap diwujudkan dengan memperluas daerah pendudukannya meski dengan melanggar perjanjian yang ada. Seperti perjanjian Linggarjati yang disepakati pada 15 November 1946. Dalam perjanjian ini antara lain berisi kesepakatan pengakuan kekuasaan “de facto” RI atas pulau Jawa dan Sumatera dan pihak Belanda harus keluar dari wilayah RI sebelum tanggal 1 Januari 1947. Pada tanggal 21 Juli 1947 ternyata Belanda melakukan gerakan agresi militernya (Agresi I). Demikian pula perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 yang dilanggar sebagai tindakan agresi (Agresi II) pada tanggal 19 Desember 1948 yang akhirnya sampai berhasil menduduki Ibukota (sementara) RI

Yogyakarta dan “menangkap” pimpinan negara RI dan menawannya sebagian di Prapat, Sumatera Utara, dan sebagian lainnya di pulau Bangka.

Sesaat sebelum penangkapan mereka Presiden Soekarno telah menyerahkan kekuasaan kepada Sjafruddin Prawiranegara sebagai pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dengan demikian maka nampaknya praktis seluruh wilayah telah diduduki oleh Belanda. Namun kenyataan menunjukkan bahwa di daerah pedalaman yang nyatanya masih dikuasai RI di mana para pejuang kemerdekaan dengan setia masih bertahan dan tidak mau menyerah kepada Belanda dan tetap melakukan perlawanan secara bergerilya.

Dalam suasana demikianlah terlihat betapa besar peranan ORI dalam perjuangan kemerdekaan itu. Meski banyak daerah yang berada dalam kekuasaan Belanda namun rakyat tetap menggunakan ORI untuk belanja sehari-hari. Dan karena dalam kenyataan hanya di kota-kota yang praktis dikuasai Belanda maka di daerah pedalaman ORI masih berdaulat dan digunakan oleh Rakyat. Hanya dalam hal-hal yang terpaksa harus menggunakan uang NICA, seperti belanja barang yang hanya ada di dalam kota, maka rakyat terpaksa menukarkan ORI ini dengan uang NICA. Namun selebihnya tetap diminati dan dipergunakan uang ORI.

Keadaan terpecah-belahnya wilayah-wilayah sebagaimana yang digambarkan di atas, maka Pemerintah Pusat tidak dimungkinkan mengirimkan ORI ke daerah-daerah untuk keperluan anggarannya. Hal ini diatasi dengan pemberian wewenang untuk masing-masing daerah membuat uangnya masing-masing yang hanya berlaku di daerahnya. Dengan demikian terdapat berbagai jenis uang “ORI – Daerah” atau “ORIDA”, antara lain “URI/ORI” Propinsi Sumatera’ (ORIPS), “URI Daerah Djambi” (URIDJA).

C. Pencetakan ORI Di Yogyakarta

Yogyakarta sebagai salah satu propinsi di Indonesia yang juga merupakan daerah istimewa, karena peranannya dalam merintis, mencapai, dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tercatat dalam lembaran sejarah

perjuangan bangsa Indonesia. Bukan hanya karena dari Yogyakarta muncul Sultan Agung pahlawan nasional yang berani mengadakan penyerangan terhadap Belanda di Batavia tahun 1628 dan 1629, bukan pula hanya karena di Yogyakarta muncul Pangeran Diponegoro tokoh Perang Jawa yang mampu menguras perekonomian Belanda karena perlawanannya yang hebat selama lima tahun (1825-1830), bukan pula hanya karena Yogyakarta pernah menjadi benteng proklamasi pada tahun 1946-1949 karena statusnya sebagai ibukota RI. Namun peranan Yogyakarta masih ditambah lagi bahwa di kota yang memiliki berbagai predikat ini berhasil dikeluarkan ORI emisi II sampai dengan emisi V.¹⁶

Sebelum pencetakan ORI dipindahkan ke Yogyakarta, perjalanan pencetakan ORI telah berpindah-pindah seperti telah dijelaskan di atas. Hal itu terjadi untuk menghindari jatuhnya percetakan tersebut ke tangan Belanda.

Ketika pemerintah RI mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan maklumat pemerintah nomor 1/10 Tahun 1945 tanggal 3 Oktober 1945 untuk menghadapi sikap tentara NICA yang menerbitkan uang NICA dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat Indonesia untuk menggunakannya, Yogyakarta telah menunjukkan dukungan terhadap pemerintah dengan mengadakan gerakan pemberantasan uang NICA. Hal ini yang dilakukan oleh para pelajar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang tergabung dalam IPI. Bukan hanya itu, pada tanggal 12 Oktober 1945 Yogyakarta berani mengambil sikap yang tanpa resiko yaitu mengeluarkan maklumat yang menyatakan bahwa uang NICA tidak berlu sebagai alat pembayaran yang sah di daerah Yogyakarta. Daerah ini hanya mengakui mata uang yang disebutkan dalam Maklumat Pemerintah Nomor 1/10 Tahun 1945 sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu Uang Javashe Bank, uang pemerintah

¹⁶Wiratsongko, dkk, *Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1949*, (Jakarta : Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 Dan Perum Peruri Jakarta, 1991), hal 4

hindia Belanda yang dikeluarkan sebelum tahun 1942, dan uang kertas Jepang.¹⁷

Bahkan ketika diadakannya program pinjaman nasional yang ditetapkan oleh presiden berdasarkan undang-undang tanggal 29 April 1946, Yogyakarta menyambut baik. Bertempat di gedung Kepresidenan Yogyakarta atas prakarsa kementerian penerangan berhasil dikumpulkan para hartawan dan bangsawan Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut berhasil dikumpulkan dana sebesar f 2.000.000 (dua juta rupiah uang Jepang) yang kemudian seluruhnya dipakai untuk membeli obligasi.¹⁸ Demikian pula para pemuda yang sedang berkumpul di Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan Kongres Pemuda Indonesia II tanggal 9 Juni 1946 tidak ketinggalan. Mereka dengan spontan dan suka rela mengumpulkan uang dari para peserta yang hadir. Hasilnya terkumpul dana sebesar f 15.000 (lima belas ribu rupiah uang Jepang).¹⁹

Peristiwa-peristiwa yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa Yogyakarta selalu proaktif dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam usahanya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, khususnya dalam bidang ekonomi. Sejarah juga mencatat, kaitannya dengan lahirnya ORI sebagai mata uang pertama yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah yang dimiliki dan dikeluarkan oleh pemerintah RI, peranan Yogyakarta tidak dapat dikesampingkan. Di kota yang juga mendapat predikat sebagai kota perjuangan inilah ORI dicetak sampai dengan empat emisi, yaitu emisi kedua sampai dengan emisi kelima.

Pada akhir tahun 1945, datanglah tentara sekutu yang bertugas melucuti tentara Jepang sebagai pihak yang kalah dalam perang dunia kedua. Namun

¹⁷Dwi Ratna Nurhajarini, *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946-1950*, (Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1994), hal 15

¹⁸Dwi Ratna Nurhajarini, *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946-1950*, (Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1994), hal 27

¹⁹Dwi Ratna Nurhajarini, *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946-1950*, (Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1994), hal 28

kedatangan mereka ternyata diboncengi oleh NICA (*Netherlan Indies Civil Administration*). Karena provokasi dari tentara NICA inilah maka keadaan kota Jakarta menjadi tidak aman. Bahkan karena gentingnya kondisi di Jakarta waktu itu, maka diputuskan untuk memindahkan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta, karena Jakarta sudah tidak dapat menjamin keselamatan para pemimpin RI waktu itu.

Kondisi tersebut besar pengaruhnya terhadap proses pencetakan ORI yang telah berjalan di Jakarta. Beberapa ratus rim lembaran uang 100 (seratus) rupiah yang belum diberi nomor seri berikut peralatan serta bahan-bahan dan karyawan yang menanganinya turut dipindahkan ke Yogyakarta. Dengan keadaan seperti telah diuraikan di atas praktis pencetakan ORI di Jakarta menjadi terhenti. Selanjutnya pencetakan ORI dilaksanakan di beberapa kota. Antara lain di Percetakan NIMEF (*Netherlands-Indische Metaalwaren en Emballage Fabreken*) di Kendalpayak, Malang, juga percetakan di Solo.²⁰ Tempat-tempat pencetakan ORI di Kendalpayak Malang, Solo dan Yogyakarta secara keseluruhan diawasi oleh Pusat Perbendaharaan Negara yang berpusat di Yogyakarta. Uang yang sudah selesai dicetak segera dikirim ke Kementerian Keuangan Yogyakarta dengan menggunakan gerbong kereta api.²¹

Di Yogyakarta pencetakan ORI dilaksanakan di Percetakan Yaker dan Percetakan Kanisius. Percetakan Yaker dulu terletak di Jl. Loji kecil yang sekarang dikenal dengan Jl. Mayor Suryotomo. Sedangkan Percetakan Kanisius dulu terletak di Jl. Secodiningratan yang sekarang dikenal dengan Jl. Panembahan Senopati. Personil yang terlibat dalam kegiatan pencetakan ORI ini antara lain pegawai percetakan, pegawai dari Kementerian Keuangan yang dikenal dengan Panitia II, polisi dan tentara. Di kantor percetakan yang

²⁰Dwi Ratna Nurhajarini, *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946-1950*, (Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1994), hal 37

²¹Dwi Ratna Nurhajarini, *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946-1950*, (Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1994), hal 38

terletak di Jl. Loji Kecil, disamping mengerjakan pencetakan ORI juga mengerjakan pencetakan perangko, materai, koran dan barang cetakan lainnya. Ruang yang berfungsi untuk mencetak ORI dipisahkah dengan ruang yang difungsikan untuk mengerjakan pekerjaan cetak lainnya, sehingga di percetakan tersebut kedua ruang cetak tersebut dipisahkan dengan papan dari anyaman bambu (*gedheg*). Demikian pula para petugas yang mengurus pencetakan ORI tidak boleh bercampur dengan orang yang mengurus pekerjaan cetak lainnya. Para pekerja mendapatkan fasilitas pakaian seragam yang diberikan oleh kantor percetakan. Fasilitas lain adalah lemari yang masing-masing mendapatkan jatah satu buah dengan kunci yang harus dibawa sendiri-sendiri. Sebelum masuk dan pulang kantor para pegawai tersebut diperiksa oleh polisi. Pegawai pria oleh polisi pria, dan pegawai wanita oleh polisi wanita. Karena ketatnya pengawasan, bahkan makanpun para pegawai tidak boleh keluar dari kantor. Kantor telah menyediakan makan bagi mereka.²²

Secara keseluruhan percetakan ORI dipercayakan kepada Djaruman dari Kementerian Keuangan. Sedangkan khusus yang ada di Yogyakarta dipercayakan kepada Marsidi. Mandor bagian percetakan dipercayakan kepada Mul Saridjan yang juga merangkap urusan pencampuran bahan-bahan pencetakan. Sebagai pendesain mata uang turut berperan antara lain Dibyo Pramudjo dan Umar. Dan pembuatan klise ditangani oleh Boenjamin.

Para petugas yang menangani masalah desain ORI di Yogyakarta lebih leluasa. Meski demikian alat lukisnya harus ditinggal di kantor dan tidak boleh. Hal ini berbeda dengan para desainer yang bertugas di percetakan ORI di Jakarta. Sewaktu bekerja mereka dikarantina di Lapangan Banteng. Mengenai rancangan gambar, para desainer ORI di Yogyakarta bebas menuangkan ide-idenya. Panitia II dari kementerian keuangan hanya sebatas memberikan garis besarnya saja.

²²Dwi Ratna Nurhajarini, *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946-1950*, (Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1994), hal 38-39

Dari desain, maka dilanjutkan dalam pembuatan klise. Setelah pembuatan klise dan bahan-bahan lain selesai dikerjakan maka dilanjutkan dengan tahap pencetakan. Pencetakan waktu itu masih sangat sederhana. Pencetakan waktu itu belum menggunakan *watermark* (cetak air) dan pita pengaman. Berbeda dengan uang sekarang yang sudah memakai *watermark* dan pita pengaman. Kertas yang dipakai untuk mencetak berasal dari Leces dan Blabak. Jenis kertas putih yang dipakai disebut *wazel papler* (kertas putih yang diberi serabut dari bulu domba). Hal ini dilakukan agar uang tersebut tidak mudah ditiru. Selanjutnya uang yang sudah selesai dicetak kemudian disetorkan ke Kas Negara.²³

Satu hal yang perlu diketahui bahwa selain di Percetakan Yaker dan Percetakan Kanisius, maka pencetakan ORI juga dilakukan disebuah gudang kosong di Kantor Pos Yogyakarta. Kemudian tempat yang digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti kertas, klise, tinta dan lainnya adalah sebuah gedung yang sekarang digunakan sebagai gedung BNI 1946.²⁴

Di atas telah dikemukakan, bahwa setelah Jakarta kondisinya tidak aman dan mengakibatkan pusat pemerintahan RI pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, maka pencetakan ORI di Jakarta dihentikan. Pencetakan ORI kemudian tersebar ke padalaman. Dalam hal ini dapat disebutkan antara lain di Kendalpayak Malang, Solo dan Yogyakarta. Namun karena pusat pemerintahan ada di Yogyakarta maka uang hasil cetakan itu dikirim ke Yogyakarta dan dikeluarkan di Yogyakarta. Hal ini tampak pada tulisan yang terdapat di lembaran uang tersebut terdapat nama Yogyakarta sebagai tempat

²³Dwi Ratna Nurhajarini, *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946-1950*, (Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1994), hal 39

²⁴Dwi Ratna Nurhajarini, *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946-1950*, (Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1994), hal 40

dikeluarkannya uang tersebut. Hal itu tampak pada uang kertas emisi kedua sampai dengan kelima. Sedangkan emisi pertama dikeluarkan di Jakarta.²⁵

Percetakan ORI yang berada Kedalpayak Malang dipimpin oleh R. Soetjipto dan berada dibawah pengawasan Kementerian Keuangan. Pada tahun 1947, percetakan NIMEF yang dipergunakan sebagai kantor percetakan ORI di Kendalpayak Malang dibumihanguskan oleh pasukan TNI. Hal ini dilakukan agar percetakan tersebut tidak jatuh ke tangan Belanda. Karena pada tahun 1947 Belanda melakukan agresi militernya yang pertama untuk menguasai kembali Indonesia.

Sebagai langkah penyelamatan, maka barang-barang berharga dari percetakan NIMEF dibawa luar kota antara lain ke Kanten Ponorogo dan Yogyakarta. Barang-barang tersebut antara lain alat-alat percetakan dan sebagian uang yang telah berhasil dicetak.

Di Yogyakarta pencetakan ORI berjalan lancar. Namun pada saat terjadi Agresi Militer Belanda Kedua percetakan terpaksa ditutup. Seluruh peralatannya yang terdiri dari klise, mesin cetak kecil, kertas, dan tinta dibawa ke pengungsian. Informasi yang diperoleh adalah di Dusun Srunggo dan Kajor, yang terletak di Kelurahan Selopamiro kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.²⁶

Pencetakan ORI yang berada di Kajor menempati rumah Bapak Mertogolo dan Ibu Rusik. Tempat ini dipilih karena rumah tersebut berada di sekitar perbukitan. Dan rumah tersebut berada di paling ujung dan diapit oleh rumah-rumah penduduk sehingga dari segi keamanan lebih terjamin. Ditambah lagi letak rumah tersebut jauh dari jalan besar.

Kegiatan pencetakan uang ini dikepalai oleh Joyo Suparmono dan dibantu oleh beberapa orang antara lain Sugiyono, Muis Rudin, Kasak dan

²⁵Dwi Ratna Nurhajarini, *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946-1950*, (Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1994), hal 40-41

²⁶Dwi Ratna Nurhajarini, *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946-1950*, (Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1994), hal 42

Subiyono. Sebagai pengawas dalam kegiatan adalah Joho dan Usin personil dari MBKD. Bahan yang dipakai dalam proses pencetakan ini diambil dari Plasa dan Jumbeng. Kegiatan yang berlangsung di desa Kajor Selopamioro Imogiri Bantul ini tidak langsung memproses hingga menjadi uang. Namun hanya pada kegiatan pemotongan kertas saja sehingga menjadi bentuk lembaran-lembaran. Selanjutnya lembaran-lembaran kertas tersebut dimasukkan dalam kotak. Sedangkan proses penyelesaian hingga menjadi bentuk uang di selenggarakan di Dusun Srunggo, Selopamioro, Imogri, Bantul.²⁷

Ketika para pejuang percetakan ORI berada di pengungsian, mereka berhasil mengeluarkan uang pecahan 75 (tujuh puluh lima) rupiah. Namun ORI baru ini tidak beredar secara luas. Mengenai kualitas uang pecahan baru ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan ORI hasil cetakan percetakan Yaker yang berada di Jl. Loji Kecil maupun percetakan Kanisius di Jl. Secodiningratan.²⁸ Dalam buku Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta diterangkan bahwa uang pecahan baru tersebut dikeluarkan melalui keuangan militer di luar kota. Meski demikian uang tersebut tidak diterima oleh masyarakat. Hal ini disebabkan masih adanya keraguan di masyarakat, karena diantara instansi-instansi pemerintah belum ada kesamaan pengertian. Uang tersebut merupakan uang darurat, dengan gambar yang kurang baik dan sangat kasar baik bentuk dan warnanya.²⁹

Setelah perjanjian Roem-Royen yang berhasil disepakati pada tanggal 7 Mei 1949, maka proses pengembalian Kota Yogyakarta dimulai. Penarikan pasukan Belanda dari wilayah Yogyakarta dimulai tanggal 24 Juni dan berakhir tanggal 29 Juni 1949. Bersamaan dengan hal tersebut secara

²⁷Dharmono Hardjowidjono (ed), *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta Jilid II, (Yogyakarta : Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan DIY, 1984/1985), hal 265-266*

²⁸Dwi Ratna Nurhajarini, *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946-1950, (Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1994), hal 42*

²⁹*Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogyakarta, (Jakarta : Kementerian Penerangan, 1953), hal 415*

berangsur-angsur, tahap demi tahap TNI masuk kota Yogyakarta. Tanggal 29 Juni 1949 Belanda berhasil ditarik keluar Kota Yogyakarta dan TNI berhasil masuk kota dan mengasai kota Yogyakarta. Selanjutnya secara berturut-turut para pemimpin negara yang telah ditawan Belanda sejak agresi militer keduanya mulai kembali ke Yogyakarta. Melalui Maguwi Presiden Soekarno, Drs. Mohammad Hatta dan para pembesar lainnya mulai masuk kota Yogyakarta tanggal 6 Juli 1949. Kemudian disusul Pangsar Jenderal Soedirman yang masuk kota Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949. Dengan kembalinya Yogyakarta ke tangan RI, maka percetakan yang semula berada di pengungsian mulai ditarik masuk kota Yogyakarta kembali.

Sejak Oktober 1946 sampai dengan Desember 1949 pemerintah Indonesia telah berhasil menerbitkan mata uang asli Indonesia sebanyak lima kali. Emisi pertama dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1946 dan dicetak di percetakan Salemba. Meski demikian uang ini telah dicetak tanggal 17 Oktober 1945 seperti tertulis dalam lembaran uang kertas tersebut. Uang ini ditandatangani oleh Mr. A.A. Maramis selaku menteri keuangan. Emisi kedua dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 1947 dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Emisi ketiga dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 1947 dan ditandatangani oleh Mr. A.A. Maramis sebagai menteri keuangan. Emisi keempat dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Agustus 1948 dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan *ad interim* Drs. Mohammad Hatta. Emisi kelima dikeluarkan di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1949 dan ditandatangani oleh Mr. Lukman Hakim. ORI dari emisi kedua tahun 1947 sampai dengan emisi kelima tahun 1949 dicetak di percetakan Kanisius yang terletak di Jl. Secodiningratan (sekarang Jl. Penembahan Senopati).³⁰

Pada emisi keempat tahun 1948, beberapa nominal seri ini memiliki keunikan, yaitu terbitnya pecahan 40, 75, 400, dan 600 rupiah. Namun

³⁰Wiratsongko, dkk, *Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1949*, (Jakarta : Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 Dan Perum Peruri Jakarta, 1991), hal 6

nominal yang terakhir disebutkan tidak sempat beredar. Sedangkan keunikan dari ORI emisi kelima yang dikeluarkan tahun 1949 adalah ada kata-kata “Rupiah Baru”.³¹

Kehadiran ORI sebagai mata uang asli bangsa Indonesia yang berhasil dikeluarkan sejak Oktober 1946 benar-benar mampu mengatasi permasalahan ekonomi akibat tingginya inflasi yang diakibatkan oleh terlalu banyaknya beredar uang Jepang diatas batas kewajaran. Disamping itu kelahiran ORI juga memiliki makna politis yaitu menjadi alat perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi Belanda.³² Bahkan karena begitu besarnya peranan ORI pada masa revolusi fisik, *Prof. DR. J.K. Gailbraith* seorang pakar dari Amerika Serikat memberikan pernyataan bahwa ORI merupakan suatu alat revolusi (*an instrument of revolution*). Peranan ORI ini juga dapat diidentikkan dengan peran *Continental Money* atau *Greenbancks* yang pernah dikeluarkan oleh negara-negara koloni pada masa Perang Kemerdekaan Amerika pada abad XVII.³³

Disamping dengan diterbitkannya ORI, langkah antisipasi yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia untuk menghadapi kekacauan ekonomi dimasa awal kemerdekaan adalah dengan didirikannya Bank Negara Indonesia

³¹Wiratsongko, dkk, *Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1949*, (Jakarta : Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 Dan Perum Peruri Jakarta, 1991), hal 6

³²Oleh karena AFNEI tidak mencabut pemberlakuan mata uang NICA, maka pada tanggal 26 Oktober 1946 pemerintah RI memberlakukan mata uang baru ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai alat tukar yang sah di seluruh wilayah RI. Sejak saat itu mata uang Jepang, mata uang Hindia Belanda dan mata uang De Javasche Bank dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian hanya ada dua mata uang yang berlaku yaitu ORI dan NICA. Masing-masing mata uang hanya diakui oleh yang mengeluarkannya. Jadi ORI hanya diakui oleh pemerintah RI dan mata uang NICA hanya diakui oleh AFNEI. Rakyat ternyata lebih banyak memberikan dukungan kepada ORI. Hal ini mempunyai dampak politik bahwa rakyat lebih berpihak kepada pemerintah RI dari pada pemerintah sementara NICA yang hanya didukung AFNEI. Lihat <http://www.uang-kuno.com/2008/03/sejarah-uang-indonesia-1.html>

³³Wiratsongko, dkk, *Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1949*, (Jakarta : Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 Dan Perum Peruri Jakarta, 1991), hal 10

pada tanggal 1 Nopember 1946. Bank Negara Indonesia yang berada di Yogyakarta ini berdiri atas jasa besar seorang putra bangsa yang bernama Margono Joyohadikusumo.³⁴ Hasil rintisan dialah bank yang kini dikenal dengan nama BNI 1946 ini berdiri. Tugas utama dari BNI itu antara lain mengatur nilai tukar ORI dengan nilai valuta asing yang beredar di Indonesia.³⁵

Setelah malang melintang dengan perannya pada masa revolusi fisik, akhirnya ORI ditarik dari peredaran. Hal ini karena pemerintah RIS mengeluarkan uang baru yang merupakan uang RIS yang pertama dan sekaligus yang terakhir. Karena uang kertas yang terdiri dari pecahan bernilai 5 dan 10 rupiah kembali tidak berlaku lagi sejak tanggal 17 Agustus 1950 dengan leburnya RIS kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Uang RIS yang terbit dengan emisi tanggal 1 Januari 1950 ini dicetak di *Thomas de la rue & Co Ltd, London*. Karena dicetak di luar negeri maka mutu uang RIS ini sekelas dengan uang di negara-negara maju. Dengan demikian dengan alasan untuk penyehatan keuangan maka ORI ditarik dari peredaran pada sekitar bulan Pebruari 1950 dan sebagai gantinya diberlakukan *uang de Javasche Bank*.³⁶

³⁴Untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia, pemerintah RI pada tanggal 1 November 1946 mengubah Yayasan Pusat Bank pimpinan Margono Djojohadikusumo menjadi Bank Negara Indonesia (BNI). Beberapa bulan sebelumnya pemerintah juga telah mengubah bank pemerintah pendudukan Jepang *Shomin Ginko* menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan *Tyokin Kyoku* menjadi Kantor Tabungan Pos (KTP) yang berubah nama pada Juni 1949 menjadi Bank tabungan Pos dan akhirnya di tahun 1950 menjadi Bank Tabungan Negara (BTN). Semua bank ini berfungsi sebagai bank umum yang dijalankan oleh pemerintah RI. Fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta pemberi jasa di dalam lalu lintas pembayaran. Lihat <http://www.uang-kuno.com/2008/03/sejarah-uang-indonesia-1.html>

³⁵Dharmono Hardjowidjono (ed), *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta Jilid II, (Yogyakarta : Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan DIY, 1984/1985), hal 344.*

³⁶Wiratsongko, dkk, *Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1949*, (Jakarta : Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 Dan Perum Peruri Jakarta, 1991), hal 10

Sejalan dengan perkembangan politik, pada pada tanggal 20 Maret 1950, pemerintah RIS yang waktu itu pada masa pemerintahan Kabinet Hatta, melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RIS Mr. Sjafruddin Prawiranegara, nomor PU/1 tanggal 20 Maret 1950, telah dilakukan pengguntingan uang kertas *de Javasche Bank* dan Hindia Belanda dari pecahan bernilai 5 rupiah (gulden) ke atas menjadi dua bagian. Yang bagian kiri bernilai 50% dari nilai sebelumnya. Berlaku sampai dengan tanggal 9 April 1950. Sedangkan bagian kanan dapat ditukar dengan obligasi negara berbunga 3% pertahun dengan jangka waktu 40 tahun. Kebijakan inilah yang kemudian populer dengan sebutan “Gunting Sjafruddin”. Kebijakan ini tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 riwayat RIS berakhir dan muncul kembali NKRI dengan UUD 1945 nya.³⁷

Selanjutnya pada tanggal 17 April 1952, Pemerintah RI dan *Johan Enshede en Zonen Grafische Inrichting NV* dari Haarlem Belanda, membentuk Perseroan Terbatas dengan nama “Percetakan Kebayoran NV”. Menteri Keuangan RI Dr. Sumitro Djojohadikusumo menetapkan Mr. Rd. Soetikno Slamet, Thesauri Jenderal Departemen Keuangan, untuk bertindak mewakili Pemerintah Indonesia. Sejak itulah Perkeba nama yang lebih terkenal dari Percetakan Kebayoran, mulai mencetak uang kertas RI. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 19 Prp/1960, maka peraturan pemerintah no 34/1960 tertanggal 3 Juni 1960 mengubah status perusahaan Perkeba menjadi Perusahaan negara (PN) Perkeba. Pengelolaannya kini ditangani oleh Direksi Bank Indonesia.

Sementara itu, menteri keuangan Dr. Ong Eng Die dengan Surat Keputusan No. 261156/UMI tertanggal 18 September 1954, memutuskan didirikannya Perusahaan negara Artha Yasa, yang bertugas mencetak mata uang lagam Indonesia dan mulai berproduksi 1 Januari 1957. Kemudian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60/1971, PN Perkeba dan

³⁷Wiratsongko, dkk, *Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1949*, (Jakarta : Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 Dan Perum Peruri Jakarta, 1991), hal 10

PN Artha Yasa dilebur menjadi satu, berstatus Perum, dengan nama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, yang disingkat Perum Peruri. Selain mencetak uang, Perum Peruri juga mencetak surat-surat berharga termasuk perangko, dan membuat barang-barang logam lainnya melayani pesanan pemerintah, lembaga-lembaga negara, Bank Indonesia dan Umum.³⁸

Perum Peruri didirikan pada tanggal 15 September 1971. Pendirian ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 1971, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2000 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006.³⁹

³⁸Wiratsongko, dkk, *Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1949*, (Jakarta : Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 Dan Perum Peruri Jakarta, 1991), hal 10-12

³⁹http://id.wikipedia.org/wiki/Percetakan_Uang_Republik_Indonesia#Sejarah

BAB IV
KOLEKSI MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA
TERKAIT DENGAN MATA UANG ORI

Menurut ICOM (Internasional Council Of Museum) definisi museum adalah badan atau lembaga tetap yang tidak mencari keuntungan yang bertugas untuk mengumpulkan, merawat, meneliti, dan menyajikan untuk kepentingan studi dan kenikmatan, setiap benda pembuktian alam, manusia dan kebudayaan. Selanjutnya benda-benda tersebut disebut dengan koleksi museum. Pengertian koleksi museum sendiri adalah semua jenis benda materiil hasil budaya manusia, alam dan lingkungannya yang disimpan di museum dan mempunyai nilai bagi dan atau pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan tehnologi serta kebudayaan.

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai museum khusus sejarah perjuangan nasional tentu saja memiliki tugas seperti tersebut diatas. Benda-benda yang dikumpulkan di museum dan menjadi koleksi museum merupakan aspek yang harus dilestarikan sehingga dapat dikomunikasikan kepada generasi muda secara berkesinambungan. Agar benda koleksi di museum tidak menjadi koleksi yang bisu dan dapat dimanfaatkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya maka koleksi tersebut harus bisa berbicara. Agar koleksi tersebut tidak bisu maka sebagai pekerja museum senantiasa selalu mengadakan pengkajian terhadap koleksi yang dimiliki sehingga data koleksi yang dikomunikasikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hal ini juga berkaitan dengan ungkapan bahwa museum adalah “Jendela Jaman”. Ini artinya dengan melihat koleksi-koleksi di Museum bisa mewakili suatu jaman dan kita bisa melihat suatu peristiwa pada jaman tersebut.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka dalam kegiatan pengkajian yang mengambil tema ORI ini akan menambah perbendaharaan sumber sejarah mata uang di Indonesia. Adapun koleksi-koleksi di Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta yang terlkait dengan mata uang ORI adalah sebagai berikut:

1. Nama Koleksi : Lampu gantung

Ukuran : Panjang keseluruhan 145 cm, lingkaran tempat minyak 42 cm, diameter tempat minyak 21 cm, tinggi tempat minyak 25 cm

Diskripsi : Warna coklat tua, bahan besi dan keramik. Berbentuk lampu gantung, sudah tidak dapat berfungsi.

Keterangan : Lampu gantung ini semula adalah milik Bapak Mertodikromo yang bertempat tinggal di Dusun Kajor, Selopamioro, Imogiri Bantu. Lampu tersebut berperan sebagai sarana penerangan (lampu penerangan) di rumah Bapak



Mertodikromo yang waktu itu dipergunakan sebagai tempat berlangsungnya proses pencetakan ORI (*Oeang Repoeblik Indonesia*). Bapak Mertodikromo adalah putra dari Bapak Mertonggolo yang waktu itu rumahnya dipakai sebagai tempat aktivitas pencetakan (pemotongan kertas) ORI. Rumah tersebut kini ditempati oleh putranya yang bernama Mertodikromo. Sedangkan lampu gantung tersebut sebelum diserahkan kepada putranya (Mertodikromo) adalah milik Bapak Mertonggolo.

Kegiatan pemotongan kertas dalam rangka pencetakan ORI di rumah Bapak Mertodikromo (putra Mertonggolo) terlansung selama tahun 1948-1949 ketika Belanda melakukan agresi militernya atas Kota Yogyakarta. Percetakan ORI yang sebelumnya berlangsung di Percetakan Yaker dan Kanisius di kota Yogyakarta turut mengungsi keluar kota. Dalam pengungsian tersebut berhasil dikeluarkan uang kertas senilai 75 rupiah.

2. Nama Koleksi : Foto mata uang ORI Jakarta nilai 5 rupiah tahun 1947 (2 Lembar)

Ukuran : 14,8 cm x 7 cm

Diskripsi : Warna hijau, sisi depan gambar Sukarno presiden pertama Indonesia, ditanda tangani oleh menteri keuangan Syafrudin Prawiranegara tanggal 1 Januari 1947 di Yogyakarta, sisi belakang ada undang-undang di bagian tengah dan kanan kiri ada tulisan angka 5, dengan no seri 137792 QA

Keterangan : Mata uang lima rupiah merupakan ORI seri kedua/ORI II dikeluarkan di Yogyakarta tanggal 1 Januari 1947. ORI



II ini mempunyai 4 pecahan yaitu 5, 10 25 dan 100 rupiah. Tiga diantaranya yaitu pecahan 5, 10 dan 100 rupiah memiliki bentuk yang sama dengan ORI I. Mata uang ORI II ini ditandatangani oleh menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara.

Pada tahun 1945 pernah dikeluarkan pecahan mata uang atau yang dikenal dengan ORI I. Mata uang ORI seri I yang tertanggal 17 Oktober 1945 walaupun pada kenyataannya uang ini beredar jauh sesudahnya. ORI Seri I memiliki 8 pecahan yaitu 1 sen, 5 sen, 10 sen, ½ rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah 100 rupiah, yang ditandatangani oleh AA. Maramis.

3. Nama Koleksi : Foto mata uang ORI Jakarta tahun 1945 nilai 5 sen (2 lembar)

Ukuran : 9,8 cm x 4,7 cm
Diskripsi : Warna hijau, gambar bunga di tiga sisinya, angka 5 di sudut kanan kiri atas, bagian belakang ada tulisan undang-undang di bagian tengah. Dikeluarkan di Jakarta tertanggal 17 Oktober 1945.

Keterangan : Pecahan mata uang dengan nominal 5 sen merupakan mata uang cetakan yang pertama atau dikenal dengan ORI



I. Selain pecahan 5 sen pada periode ini juga dicetak pecahan 1 sen, 5 sen, 10 sen, ½ rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, 100 rupiah. Semua pecahan mata uang ini tertanggal 17 Oktober 1945 dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan AA. Maramis. Walaupun emisi pertama ini tertanggal 17 Oktober 1945 akan tetapi sejarah mencatat bahwa tanggal 30 Oktober 1946 adalah awal penerbitan mata uang RI.

4. Nama Koleksi : Foto mata uang ORI Yogyakarta nilai 10 sen baru tahun 1949

Ukuran : 15,9 Cm x 10 cm

Diskripsi : Warna (dicek). Sisi depan tulisan angka 10 di bagian tengah, ada tanda tangan menteri Keuangan tanggal 17 Agustus 1949 (dicek). Sisi belakang tulisan undang-undang di tengah dan kanan kiri ada gambar bangun layang-layang dengan tulisan angka 10 dan sen baru.

Keterangan : Mata uang ORI pecahan dengan nilai 10 sen baru ini dikeluarkan di Yogyakarta tertanggal 17 Agustus 1949 atau dikenal dengan ORI V. Pecahan 10 sen baru ini

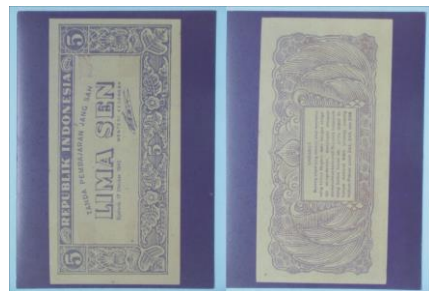
dicetak dua seri dengan warna yang berbeda tetapi dengan gambar dan ukuran yang sama. Pertama warna merah pada sisi



depan dan warna hijau pada sisi belakang, yang kedua warna biru sisi depan dan warna coklat pada sisi belakang. Pecahan 10 sen baru ini ditandatangani oleh Lukman Hakim. ORI V atau ORI seri kelima ini mengeluarkan 4 pecahan dengan yaitu, 10 sen baru dengan dua warna, 1/2 rupiah baru dengan dua warna 10 rupiah baru dengan dua warna dan 100 rupiah.

5. Nama Koleksi : Foto mata uang ORI Yogyakarta nilai 5 sen tahun 1945
 Ukuran : 9.8 cm x 4,7 cm
 Diskripsi : Warna tepi bingkai biru, bagian tengah ada gambar banteng agak samar, sisi depan ada tulisan angka 1 rupiah baru dibagian tengah, ada tanda tangan menteri Keuangan tertanggal 17 Agustus 1945 bagian belakang angka 1 di tengah, tulisan undang-undang di bawah angka 1.

Keterangan : Mata uang ORI pecahan 5 sen ini merupakan cetakan pada seri pertama tahun 1945 walaupun



peredarannya jauh tahun sesudahnya. Mata uang ini ditandatangani oleh AA. Maramis. Cetakan uang lima sen ini tidak memiliki seri dan memiliki 3 variasi cetakan yaitu 1. Gambar banteng samar-samar denganh dasar

warna violet 2. Gambar banteng samar-samar dengan tepi/bingkai berwarna biru kehitaman, 3. Gambar banteng tajam.

6. Nama Koleksi : Foto mata uang ORI Yogyakarta nilai 10 rupiah tahun 1947

Ukuran : 15,9 cm x 7,7 cm

Diskripsi : Warna hijau, sisi depan gambar Sukarno dan gambar pemandangan gunung dan persawahan, ada tanda tangan Menteri Keuangan Syafrudin Prawiranegara tertanggal 1 Januari 1947, bagian belakang tulisan undang-undang di bagian tengah dengan no seri SE381058.

Keterangan : ORI II tahun 1947

hanya mengeluarkan 4 pecahan mata uang yaitu, 5,10, 25 dan 100 rupiah. Mata uang Pecahan



sepuluh rupiah ini pada masa ORI I juga sudah dicetak yang ditandatangani oleh AA. Maramis. Pada masa ORI II tahun 1947 pecahan sepuluh rupiah dicetak lagi yang mirip dengan cetakan ORI I perbedaannya hanya pada tandatangan yaitu ORI II ditandatangani oleh Syafrudin Prawiranegara. Pecahan sepuluh rupiah ini memiliki 6 variasi nomor seri yang bedanya pada macam hurufnya dan tanda tangannya.

7. Nama Koleksi : Foto mata uang ORI Yogyakarta nilai 25 rupiah tahun 1947

Ukuran : 16,6 cm x 7,9 cm
Diskripsi : Warna hijau, bagian depan gambar Sukarno dan pemandangan alam danau dan gunung, ditandatangani di Yogyakarta tanggal 1 Januari 1947 oleh Menteri Keuangan, bagian belakang gambar badak dan tulisan undang-undang. No seri UE883078

Keterangan : ORI II tahun 1947 hanya mengeluarkan 4 mata uang pecahan yaitu 5, 10, 25 dan 100 rupiah. Tiga diantaranya



yaitu pecahan 5, 10, dan 100 rupiah memiliki bentuk yang sama dengan ORI I. hanya pecahan 25 yang berbeda. Semua pecahan tertanggal Djokjakarta 1 Januari 1947 dan ditanda tangani oleh Syafrudin Prawiranegara. Uang seri ini belum memiliki pengaman yang baik yang membedakan hanya kualitas kertas dan kode control nomor seri yang membedakan uang palsu dan uang asli. Pecahan 25 rupiah sendiri dicetak dalam beberapa nomor seri.

8. Nama Koleksi : Foto mata uang ORI Yogyakarta nilai 50 rupiah tahun 1947

Ukuran : 14,3 cm x 8,3 cm

Diskripsi : Warna hijau, bagian depan gambar Sukarno di sebelah kiri dan penyadap karet di sebelah kanan, ditandatangani oleh Menteri Keuangan AA Maramis tertanggal 26 Djuli 1947, Bagian belakang tulisan undang-undang di bagian tengah.

Keterangan : ORI yang dicetak pada tahun 1947 dibagi dalam dua seri yaitu seri II dan Seri III atau dikenal dengan ORI II dan



ORI III. Pada periode ORI III dicetak 7 pecahan dengan nilai : ½, 2,5, 25, 50 100, 250 rupiah. Pecahan 100 rupiah dicetak dua variasi yaitu 100 rupiah dengan gambar Sukarno dan keris dengan warna coklat dan 100 rupiah dengan gambar Sukarno dengan perkebunan tembakau warna hijau. Semua pecahan yang dicetak pada periode ini tertanggal 26 Djuli 1947 dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan AA. Maramis.

9. Nama Koleksi : Foto mata uang ORI tahun 1947 Rp 100

Ukuran : 17,3 cm x 8,5 cm

Diskripsi : Warna hijau, bagian depan gambar Sukarno di sebelah kiri dan penyadap karet di sebelah kanan, ditandatangani oleh Menteri Keuangan AA Maramis tertanggal 26 Djuli 1947, Bagian belakang tulisan undang-undang di bagian kanan dan kiri

Keterangan : ORI yang dicetak pada tahun 1947 dibagi dalam dua seri yaitu seri II dan Seri III atau dikenal dengan ORI II dan



ORI III. Pada periode ORI III dicetak 7 pecahan dengan nilai : ½, 2,5, 25, 50 100, 250 rupiah. Pecahan 100 rupiah dicetak dua variasi yaitu 100 rupiah dengan gambar

Sukarno dan keris dengan warna coklat dan 100 rupiah dengan gambar Sukarno dengan perkebunan tembakau warna hijau. Semua pecahan yang dicetak pada periode ini tertanggal 26 Djuli 1947 dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan AA. Maramis.

10. Nama Koleksi : Foto mata uang ORI Yogyakarta tahun 1947 nilai Rp. 250

Ukuran : 15,4 cm x 9,2 cm

Diskripsi : Warna hijau, sisi depan gambar Sukarno disebelah kiri dan wanita memanen padi di sebelah kanan, ditandatangani oleh Menteri Keuangan AA. Maramis tanggal 26 Djuli 1947. Nomor seri RI030057

Keterangan : ORI yang dicetak pada tahun 1947 dibagi dalam dua seri yaitu seri II dan Seri III atau dikenal dengan ORI II dan ORI



III. Pada periode ORI III dicetak 7 pecahan dengan nilai : ½, 2,5, 25, 50 100, 250 rupiah. Pecahan 100 rupiah dicetak dua variasi yaitu 100 rupiah dengan gambar Sukarno dan keris dengan warna coklat dan 100 rupiah dengan gambar Sukarno dengan perkebunan tembakau warna hijau. Semua pecahan yang dicetak pada periode ini tertanggal 26 Djuli 1947 dan ditandatangani oleh AA. Maramis

11. Nama Koleksi : Foto mata uang ORI Yogyakarta nilai 40 rupiah tahun 1948

Ukuran : 14 cm x 8 cm

Diskripsi : Warna hijau, bagian depan gambar Sukarno di sebelah kiri dan wanita menenun di sebelah kanan, ditandatangani oleh Menteri Keuangan tertanggal 23 Agustus 1948, Bagian belakang tulisan undang-undang di bagian tengah.

Keterangan : Tahun 1948 dikategorikan dalam ORI IV. Pada masa ini mengeluarkan 5 pecahan dengan nilai yang aneh



yaitu : 40, 75, 100, 400, dan 600 rupiah. Pecahan-pecahan ini semuanya tertanggal Jogjakarta 23 Agustus 1948 dan ditandatangani oleh M. Hatta. Pecahan ini memiliki nomor seri yang digunakan sebagai pengaman. Pecahan 40 rupiah merupakan salah satu pecahan yang dicetak pada tahun 1948 dan merupakan nominal yang paling kecil.

12 Nama Koleksi : Foto mata uang ORI Yogyakarta nilai 75 rupiah tahun 1948

Ukuran : 15 cm x 8,3 cm

Diskripsi : Warna hijau, bagian depan gambar Sukarno di sebelah kiri dan penyadap karet di sebelah kanan, tulisan 26 Juli 1947 bagian belakang tulisan undang-undang di tengah ada tulisan undang-undang. Ada no seri TH 176176

Keterangan : Tahun 1948 dikategorikan dalam ORI IV. Pada masa ini mengeluarkan 5 pecahan dengan



nilai yang aneh yaitu : 40, 75, 100, 400, dan 600 rupiah. Pecahan-pecahan ini semuanya tertanggal Jogjakarta 23 Agustus 1948 dan ditandatangani oleh M. Hatta. Pecahan ini memiliki nomor seri yang digunakan sebagai pengaman. Pecahan 40 rupiah merupakan salah satu pecahan yang dicetak pada tahun 1948 dan merupakan nominal yang paling kecil.

13. Nama koleksi : Foto mata Uang ORIDA Banten nilai 1 rupiah

Ukuran : 17 cm x 8 cm

Diskripsi : Warna dasar krem warna gambar pink, sisi depan gambar cangkul dan senapan di tengah, sisi belakang undang-undang di tengah. Nomor seri BA97662

Keterangan : Karena ORI tidak dapat diedarkan di Sumatra, pada 1947 beberapa daerah di Sumatera mengeluarkan jenis uang



sendiri. Seperti ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Provinsi Sumatera), URISU (Oeang RI Sumatera Utara), ORIDJA (Oeang RI Daerah Djambi), URIDA (Oeang RI Daerah Aceh), ORITA (Oeang RI Daerah Tapanuli), Oeang Mandat yang dikeluarkan Dewan Pertahanan Sumatera Selatan), dan ORIDAB (Uang RI Daerah Banten).

Oleh karena kondisi yang sulit pada awal kemerdekaan RI, maka untuk mengatasi kesulitan dan kelangkaan alat pembayaran yang sah maka beberapa daerah menerbitkan mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan otoritas dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk melancarkan roda perekonomian yang mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan RI. Seperti di Serang Banten untuk menjaga agar perekonomian daerah Banten tidak lumpuh maka daerah ini mencetak mata uang daerah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan tertanggal Serang 15 Desember 1947 ditandatangani oleh Residen Banten Haji Tubagus Achmad Chatib dan Panitia Keuangan Abubakar Winangun I Jusuf Adiwinata

14. Nama Koleksi : Foto mata uang ORIDA Banten nilai 5 rupiah
 Ukuran : 14,cm x 7,5 cm
 Diskripsi : Warna hijau, sisi depan gambar gapura tradisonal dan sisi belakang undang-undang di bagian kanan. Di keluarkan di Serang tanggal 10 Desember 1947, nomor seri NA91793

Keterangan : Karena ORI tidak dapat diedarkan di Sumatra, pada 1947 beberapa daerah di Sumatera mengeluarkan jenis



uang sendiri. Seperti ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Provinsi Sumatera), URISU (Oeang RI

Sumatra Utara), ORIDJA (Oeang RI Daerah Djambi), URIDA (Oeang RI Daerah Aceh), ORITA (Oeang RI Daerah Tapanuli), Oeang Mandat yang dikeluarkan Dewan Pertahanan Sumatera Selatan), dan ORIDAB (Uang RI Daerah Banten).

Oleh karena kondisi yang sulit pada awal kemerdekaan RI, maka untuk mengatasi kesulitan dan kelangkaan alat pembayaran yang sah maka beberapa daerah menerbitkan mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan otoritas dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk melancarkan roda perekonomian yang mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan RI. Seperti di Serang Banten untuk menjaga agar perekonomian daerah Banten tidak lumpuh maka daerah ini mencetak mata uang daerah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan tertanggal Serang 15 Desember 1947 ditandatangani oleh Residen Banten Haji Tubagus Achmad Chatib dan Panitia Keuangan Abubakar Winangun I Jusuf Adiwinata.

15. Nama Koleksi : Foto mata uang ORIDA Banten nilai 50 rupiah
Ukuran : 15 cm x 8,2 cm
Diskripsi : Warna coklat sisi depan gambar masjid dan gapura tradisional, sisi belakang undang-undang dibagian tengah. Nomor seri HL33786
Keterangan : Karena ORI tidak dapat diedarkan di Sumatera, pada 1947 beberapa daerah di Sumatera mengeluarkan jenis uang sendiri. Seperti ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Provinsi Sumatra), URISU (Oeang RI

Sumatra Utara),
ORIDJA (Oeang RI
Daerah Djambi),
URIDA (Oeang RI
Daerah Aceh), ORITA
(Oeang RI Daerah



Tapanuli), Oeang Mandat yang dikeluarkan Dewan
Pertahanan Sumatera Selatan), dan ORIDAB (Uang RI
Daerah Banten).

Oleh karena kondisi yang sulit pada awal kemerdekaan RI, maka untuk mengatasi kesulitan dan kelangkaan alat pembayaran yang sah maka beberapa daerah menerbitkan mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan otoritas dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk melancarkan roda perekonomian yang mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan RI. Seperti di Serang Banten untuk menjaga agar perekonomian daerah Banten tidak lumpuh maka daerah ini mencetak mata uang daerah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan tertanggal Serang 15 Desember 1947 ditandatangani oleh Residen Banten Haji Tubagus Achmad Chatib dan Panitia Keuangan Abubakar Winangun I Jusuf Adiwinata

16. Nama Koleksi : Foto mata uang ORIDA Tapanuli nilai 1 rupiah tahun 1947
- Ukuran : 16,7 cm x 9,8 cm
- Diskripsi : Warna putih, tinggal sisi belakang dengan undang-undang di tengah, dikeluarkan di Gunung Sitoli 25 September 1947.

Keterangan : Karena ORI tidak dapat diedarkan di Sumatera, pada 1947 beberapa daerah di Sumatera mengeluarkan jenis uang sendiri. Seperti



ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Provinsi Sumatra), URISU (Oeang RI Sumatera Utara), ORIDJA (Oeang RI Daerah Djambi), URIDA (Oeang RI Daerah Aceh), ORITA (Oeang RI Daerah Tapanuli), Oeang Mandat yang dikeluarkan Dewan Pertahanan Sumatera Selatan), dan ORIDAB (Uang RI Daerah Banten).

Oleh karena kondisi yang sulit pada awal kemerdekaan RI, maka untuk mengatasi kesulitan dan kelangkaan alat pembayaran yang sah maka beberapa daerah menerbitkan mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan otoritas dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk melancarkan roda perekonomian yang mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan RI. Di Tapanuli Nias untuk mengatasi kesulitan alat pembayaran dan kelancaran perekonomian maka dicetak mata uang daerah Tapanuli dengan nominal 1 rupiah dikeluarkan di Gunung Sitoli, 25 September 1947 dan 500 rupiah dengan tiga variasi dengan ketetapan Bupati Nias yaitu pertama ditetapkan tanggal 5 Januari 1949, 7 Januari 1949 dan 12 November 1949 dan ditandatangani oleh Pemegang Kas Kabupaten Nias.

17. Nama Koleksi : Foto mata uang ORIDA Tapanuli nilai 500 rupiah tahun 1949 (2 lembar

Ukuran : 15,7 cm x 8,3 cm

Diskripsi : Warna putih tertanggal 5 Januari 1949 No. 1/1949, sisi depan tulisan angka 500 di kanan kiri, sisi belakang tulisan undang-undang di bagian tengah.

Keterangan : Karena ORI tidak dapat diedarkan di Sumatera, pada 1947 beberapa daerah di Sumatra mengeluarkan



jenis uang sendiri. Seperti ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Provinsi Sumatera), URISU (Oeang RI Sumatera Utara), ORIDJA (Oeang RI Daerah Djambi), URIDA (Oeang RI Daerah Aceh), ORITA (Oeang RI Daerah Tapanuli), Oeang Mandat yang dikeluarkan Dewan Pertahanan Sumatera Selatan), dan ORIDAB (Uang RI Daerah Banten).

Oleh karena kondisi yang sulit pada awal kemerdekaan RI, maka untuk mengatasi kesulitan dan kelangkaan alat pembayaran yang sah maka beberapa daerah menerbitkan mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan otoritas dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk melancarkan roda perekonomian yang mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan RI. Di Tapanuli Nias untuk mengatasi kesulitan alat pembayaran dan kelancaran perekonomian maka dicetak mata uang daerah Tapanuli dengan

nominal 1 rupiah dikeluarkan di Gunung Sitoli, 25 September 1947 dan 500 rupiah dengan tiga variasi dengan ketetapan Bupati Nias yaitu pertama ditetapkan tanggal 5 Januari 1949, 7 Januari 1949 dan 12 November 1949 dan ditandatangani oleh Pemegang Kas Kabupaten Nias.

18. Nama Koleksi : Foto mata uang ORIDA Sumatera nilai 1 rupiah tahun 1947

Ukuran : 16,4 cm x 9,1 cm

Diskripsi : Warna merah muda, bagian depan gambar Sukarno di sebelah kiri dan gambar gunung api, sisi belakang ada undang-undang di bagian tengah dengan nomor seri QnK75436

Keterangan : Karena ORI tidak dapat diedarkan di Sumatera, pada 1947 beberapa daerah di Sumatra



mengeluarkan jenis uang sendiri. Seperti ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Provinsi Sumatera), URISU (Oeang RI Sumatra Utara), ORIDJA (Oeang RI Daerah Djambi), URIDA (Oeang RI Daerah Aceh), ORITA (Oeang RI Daerah Tapanuli), Oeang Mandat yang dikeluarkan Dewan Pertahanan Sumatera Selatan), dan ORIDAB (Uang RI Daerah Banten).

Oleh karena kondisi yang sulit pada awal kemerdekaan RI, maka untuk mengatasi kesulitan dan kelangkaan alat pembayaran yang sah maka beberapa daerah

menerbitkan mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan otoritas dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk melancarkan roda perekonomian yang mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan RI. Di Propinsi Sumatera untuk mengatasi kesulitan alat pembayaran dan perekonomian maka Propinsi Sumatera mengeluarkan mata uang sendiri yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di daerah Sumatera.

19. Nama Koleksi : Foto mata uang De Javasche Bank 5 gulden/rupiah tahun 1946

Ukuran : 15 cm x 7,5 cm

Diskripsi : Warna merah, bagian depan ada gambar bunga lotus dan tulisan angka 5, bagian belakang ada tulisan angka 5 dan angka tahun 1946 di pojok bawah kanan.

Keterangan : Masa awal kemerdekaan situasi Negara belum stabil sehingga juga mempengaruhi



keadaan perekonomian RI. Hiperinflansi terjadi akibat peredaran mata uang yang tidak terkendali.

Pada saat itu pemerintah RI belum memiliki mata uang sendiri dan sebagai alat pembayaran masih menggunakan sebelumnya. Dengan maklumat Presiden RI no. 1/10 tanggal 3 Oktober 1945 menetapkan untuk sementara waktu di seluruh Indonesia tiga mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah Indonesia

adalah : Mata uang pendudukan Jepang, mata uang De Javasche Bank, dan uang pemerintah Hindia Belanda. Diantara tiga mata uang yang diberlakukan pada saat itu yang mengalami penurunan tajam nilai tukarnya adalah mata uang Jepang. Oleh karena peredaran mata uang Jepang mencapai 4 milyar yang merupakan sumber inflansi yang paling besar.

Pada tahun 1943 Pemerintah Belanda di London mencetak mata uang Hinda Belanda dengan gambar Ratu Wihelmina yang akan dipergunakan sebagai mata uang yang akan di gunakan di daerah Hindia Belanda setelah Pendudukan Jepang berakhir. Selain itu pada tahun 1946 juga dicetak mata uang de Javansche Bank menggunakan satuan gulden dan rupiah dengan pecahan 5, 10, 25, 50, 100, 500 gulden/rupiah yang dibawa tentara Belanda pada masa Revolusi.

20. Nama Koleksi : Foto mata uang De Javasche Bank 25 rupiah tahun 1946
 Ukuran : 16 cm x 8 cm
 Diskripsi : Warna merah, bagian depan ada gambar tiga pohon kelapa laut dan tulisan angka 5, bagian belakang ada tulisan angka 5

Keterangan : Masa awal kemerdekaan situasi Negara belum stabil sehingga juga mempengaruhi



keadaan perekonomian RI. Hiperinflansi terjadi akibat peredaran mata uang yang tidak terkendali.

Pada saat itu pemerintah RI belum memiliki mata uang sendiri dan sebagai alat pembayaran masih menggunakan sebelumnya. Dengan maklumat Presiden RI no. 1/10 tanggal 3 Oktober 1945 menetapkan untuk sementara waktu di seluruh Indonesia tiga mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah Indonesia adalah : Mata uang pendudukan Jepang, mata uang De Javasche Bank, dan uang pemerintah Hindia Belanda. Diantara tiga mata uang yang diberlakukan pada saat itu yang mengalami penurunan tajam nilai tukarnya adalah mata uang Jepang. Oleh karena peredaran mata uang Jepang mencapai 4 milyar yang merupakan sumber inflansi yang paling besar.

Pada tahun 1943 Pemerintah Belanda di London mencetak mata uang Hinda Belanda dengan gambar Ratu Wihelmina yang akan dipergunakan sebagai mata uang yang akan di gunakan di daerah Hindia Belanda setelah Pendudukan Jepang berakhir. Selain itu pada tahun 1946 juga dicetak mata uang de Javansche Bank menggunakan satuan gulden dan rupiah dengan pecahan 5, 10, 25, 50, 100, 500 gulden/rupiah yang dibawa tentara Belanda pada masa Revolusi.

21. Nama Koleksi : Foto mata uang De Javasche Bank 0,5 rupiah tahun 1948
- Ukuran : 15 cm x 8 cm
- Diskripsi : Warna merah, bagian depan ada gambar bunga orchid dan tulisan angka 1/2, bagian belakang ada tulisan angka 5 dan bagian tengah ada tulisan vijf gulden dengan kode DJB.

Keterangan : Masa awal kemerdekaan situasi Negara belum stabil sehingga juga mempengaruhi keadaan perekonomian



RI. Hiperinflansi terjadi akibat peredaran mata uang yang tidak terkendali.

Pada saat itu pemerintah RI belum memiliki mata uang sendiri dan sebagai alat pembayaran masih menggunakan sebelumnya. Dengan maklumat Presiden RI no. 1/10 tanggal 3 Oktober 1945 menetapkan untuk sementara waktu di seluruh Indonesia tiga mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah Indonesia adalah : Mata uang pendudukan Jepang, mata uang De Javasche Bank, dan uang pemerintah Hindia Belanda. Diantara tiga mata uang yang diberlakukan pada saat itu yang mengalami penurunan tajam nilai tukarnya adalah mata uang Jepang. Oleh karena peredaran mata uang Jepang mencapai 4 milyar yang merupakan sumber inflansi yang paling besar.

Pada tahun 1943 Pemerintah Belanda di London mencetak mata uang Hinda Belanda dengan gambar Ratu Wihelmina yang diakan dipergunakan sebagai mata uang yang akan di gunakan di daerah Hindia Belanda setelah Pendudukan Jepang berakhir. Selain itu tahun 1946, tahun 1948 juga dicetak lagi mata uang de Javansche Bank lagi menggunakan satuan gulden dan rupiah dengan pecahan $\frac{1}{2}$, 1, 2,5, gulden rupiah.yang dibawa tentara Belanda pada masa Revolusi.

21. Nama Koleksi : Foto mata uang De Javasche Bank 0,5 rupiah tahun 1948

Ukuran : 15 cm x 8 cm

Diskripsi : Warna merah, bagian depan ada gambar bunga orchid dan tulisan angka 1/2, bagian belakang ada tulisan angka 5 dan bagian tengah ada tulisan vijf gulden dengan kode DJB.

Keterangan : Masa awal kemerdekaan situasi negara belum stabil sehingga juga mempengaruhi



keadaan perekonomian RI. Hiperinflansi terjadi akibat peredaran mata uang yang tidak terkendali.

Pada saat itu pemerintah RI belum memiliki mata uang sendiri dan sebagai alat pembayaran masih menggunakan mata uang sebelumnya. Dengan maklumat Presiden RI no. 1/10 tanggal 3 Oktober 1945 menetapkan untuk sementara waktu di seluruh Indonesia ada tiga mata uang yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah Indonesia adalah: Mata uang pendudukan Jepang, mata uang De Javasche Bank, dan uang pemerintah Hindia Belanda. Diantara tiga mata uang yang diberlakukan pada saat itu yang nilai tukarnya mengalami penurunan tajam adalah mata uang Jepang. Oleh karena peredaran mata uang Jepang mencapai 4 milyar yang merupakan sumber inflansi yang paling besar.

Pada tahun 1943 Pemerintah Belanda di London mencetak mata uang Hinda Belanda dengan gambar Ratu Wihelmina yang akan dipergunakan sebagai mata

uang di daerah Hindia Belanda setelah Pendudukan Jepang berakhir. Selain itu tahun 1946, tahun 1948 juga dicetak lagi mata uang de Javasche Bank menggunakan satuan gulden dan rupiah dengan pecahan $\frac{1}{2}$, 1, 2,5, gulden rupiah.yang dibawa tentara Belanda pada masa revolusi.

22. Nama Koleksi : Klise mata uang ORI 2,5 rupiah tahun 1947 berjumlah 4 buah

Ukuran : 11,5 cm x 6 cm

Diskripsi : Warna abu-abu, sisi depan bagian atas ada tulisan Republik Indonesia, tengah ada tulisan “tanda pembayaran yang sah dua setengah rupiah”, kiri bawah ada tulisan Djogjakarta 26 Djuli 1947, kanan bawah ada tulisan “Menteri Keuangan”. Sisi belakang bagian atas tengah ada tulisan dengan huruf “dua setengah rupiah”, di bagian tengah ada lingkaran berisi angka $2\frac{1}{2}$ di kanan ada undang-undang, di kiri ada angka $2\frac{1}{2}$ yang di tulis besar.

Keterangan : Dengan diproklamasikannya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah memandang perlu



untuk segera memiliki mata uang sendiri dan tidak menggunakan mata uang Jepang yang sebelum Indonesia merdeka digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan dikeluarkan mata uang Indonesia (ORI), secara politik mempengaruhi kedudukan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Klise mata uang ORI nilai 2,5 rupiah ini merupakan alat untuk mencetak mata uang

yang dikeluarkan pemerintah RI dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

23. Nama Koleksi : Klise mata uang ORI 2,5 rupiah tahun 1945-1947
Ukuran : 12 cm x 6,5 cm
Diskripsi : Warna abu-abu, sisi depan bagian atas ada gambar kala, dibawahnya ada angka 2½ besar dan kotak bertuliskan tentang tanda pembayaran sah dan peraturan lain, tapi kotak tersebut hilang, kiri ada gambar pohon beringin, kanan ada gambar pohon kelapa. Sisi belakang bagian atas tengah ada tulisan dengan huruf “dua setengah rupiah”, di bagian tengah ada lingkaran berisi angka 2½, di kanan ada undang-undang, di kiri ada angka 2½ yang ditulis besar.

Keterangan : Dengan diproklamasikannya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah memandang perlu



untuk segera memiliki mata uang sendiri dan tidak menggunakan mata uang Jepang yang sebelum Indonesia merdeka digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan dikeluarkan mata uang Indonesia (ORI), secara politik mempengaruhi kedudukan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Klise mata uang ORI nilai 2,5 rupiah ini merupakan alat untuk mencetak mata uang yang dikeluarkan pemerintah RI dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

24. Nama Koleksi : Klise mata uang ORI 2,5 rupiah tahun 1945-1947 sebanyak 3 buah
Ukuran : 12 cm x 6,5 cm

Diskripsi : Warna abu-abu, sisi depan bagian atas ada gambar kala, dibawahnya ada angka 2½ besar dan kotak bertuliskan tentang tanda pembayaran sah dan peraturan lain, kiri ada gambar pohon beringin, kanan ada gambar pohon kelapa. Sisi belakang bagian atas tengah ada tulisan dengan huruf “dua setengah rupiah”, di bagian tengah ada lingkaran berisi angka 2½, di kanan ada undang-undang, di kiri ada angka 2½ yang ditulis besar.

Keterangan : Dengan diproklamasikannya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah memandang perlu



untuk segera memiliki mata uang sendiri dan tidak menggunakan mata uang Jepang yang sebelum Indonesia merdeka digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan dikeluarkan mata uang Indonesia (ORI), secara politik mempengaruhi kedudukan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Klise mata uang ORI nilai 2,5 rupiah ini merupakan alat untuk mencetak mata uang yang dikeluarkan pemerintah RI dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

25. Nama Koleksi : Klise mata uang ORI 40 rupiah tahun 1945-1947

Ukuran : 14,5 cm x 8 cm

Diskripsi : Warna abu-abu, sisi depan ada kotak bertuliskan tentang tanda pembayaran sah dan peraturan lain, kiri ada angka 40, kanan ada gambar seikat padi. Sisi belakang bagian tengah ada gambar banteng dengan latar belakang pohon kelapa.

Keterangan : Dengan diproklamasikannya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah memandang perlu



untuk segera memiliki mata uang sendiri dan tidak menggunakan mata uang Jepang yang sebelum Indonesia merdeka digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan dikeluarkan mata uang Indonesia (ORI), secara politik mempengaruhi kedudukan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Klise mata uang ORI nilai 40 rupiah ini merupakan alat untuk mencetak mata uang yang dikeluarkan pemerintah RI dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

26. Nama Koleksi : Klise mata uang ORI 50 rupiah
Ukuran : 15 cm x 9 cm
Diskripsi : Warna abu-abu, sisi depan ada gambar seperti gunung, di keempat sudutnya ada angka 50. Di tengah ada angka 50 dan tulisan “lima puluh rupiah”, di bawahnya ada tulisan Propinsi Sumatra. Di sebelah kiri angka 50 ada tulisan “tanda pembayaran jang sah”. Sisi belakang ada gambar seperti gunung di tengah-tengah.

Keterangan : Dengan diproklamasikannya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah memandang perlu



untuk segera memiliki mata uang sendiri dan tidak menggunakan mata uang Jepang yang sebelum Indonesia

merdeka digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan dikeluarkan mata uang Indonesia (ORI), secara politik mempengaruhi kedudukan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Klise mata uang ORI nilai 50 rupiah ini merupakan alat untuk mencetak mata uang yang dikeluarkan pemerintah RI dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

27. Nama Koleksi : Klise mata uang ORI 100 rupiah tahun 1948
Ukuran : 15,5 cm x 9 cm
Diskripsi : Warna kuning kecoklatan, sisi depan bermotif lengkung-lengkung, bagian atas ada tulisan Republik Indonesia, di bawahnya ada tulisan “tanda pembayaran jang sah” dan seratus rupiah, serta tanda tangan gubernur Sumatera, dan nama tempat, yaitu Bukit Tinggi 17 April 1948. Di keempat sudutnya ada angka 100. Sisi belakang ada gambar gunung, di bawahnya ada tulisan “tanda pembayaran ini dianggap sah sebagai uang kertas seperti tersebut dalam pasal IX sampai XIII dari undang-undang Presiden tahun 1946 tentang peraturan pidana”. Di bawah tulisan tersebut ada tulisan seratus rupiah dan di kanan-kirinya ada angka 100 di dalam motif batik garuda.

Keterangan : Dengan diproklamasikannya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah memandang perlu



untuk segera memiliki mata uang sendiri dan tidak menggunakan mata uang Jepang yang sebelum Indonesia merdeka digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Dengan dikeluarkan mata uang Indonesia (ORI), secara politik mempengaruhi kedudukan bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Klise mata uang ORI nilai 100 rupiah ini merupakan alat untuk mencetak mata uang yang dikeluarkan pemerintah RI dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

:

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanggal 17 Agustus 1945, negara yang kemudian bernama Republik Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Sebagai negara yang baru, sudah seharusnya terus langsung berbenah, terutama dalam masalah ekonomi. Menurut Bung Hatta, panggilan akrab wakil presiden waktu itu, bahwa uang adalah tanda kemerdekaan suatu bangsa. Sebuah negara merdeka tidak cukup hanya memiliki proklamasi, pemerintahan, tanah air dan rakyat. Tetapi juga mata uang sendiri. Pandangan sang proklamator inilah yang kemudian mendasari pemikiran perlunya diadakan pencetakan uang sendiri.

Uang pertama yang berhasil dicetak oleh bangsa Indonesia sendiri dan berlaku sebagai pembayaran yang sah dikenal dengan ORI (*Oeang Repoeblik Indonesia*). Emisi pertama dari ORI ini tertulis tanggal 17 Oktober 1945 dan dicetak di Jakarta dan ditandatangani oleh Mr. AA. Maramis sebagai menteri keuangan. Meski demikian uang tersebut baru dapat beredar tanggal 30 Oktober setahun kemudian, dengan didahului dengan pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta di corong RRI Yogyakarta tanggal 29 Oktober 1946. Pencetakan ORI berlangsung dalam 5 emisi. Emisi pertama telah dijelaskan dimuka yaitu dikeluarkan di Jakarta. Sedangkan emisi berikutnya hingga emisi kelima dikeluarkan di Yogyakarta yaitu : emisi kedua tanggal 1 Januari 1947 ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Emisi ketiga tanggal 26 Juli 1947 ditandatangani oleh Mr. A.A. Maramis sebagai menteri keuangan. Emisi keempat tanggal 23 Agustus 1948 ditandatangani oleh Menteri Keuangan *ad interim* Drs. Mohammad Hatta. Emisi kelima tanggal 17 Agustus 1949 ditandatangani oleh Mr. Lukman Hakim.

Perpindahan pencetakan ORI sejalan dengan perkembangan politik yang terjadi di Indonesia. Pada bulan Oktober 1945 pasukan Sekutu tiba di Jakarta untuk mengurus tawanan perang Jepang. Namun kenyataannya mereka

diboncengi oleh Belanda yang kemudian berniat menjajah lagi Indonesia. Tindakan provokasi dan teror yang dilakukan oleh Belanda mengakibatkan kondisi Jakarta tidak aman dan dinilai tidak dapat menjamin keselamatan para pemimpin negara. Keputusan sidang kabinet, untuk sementara ibukota RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Dengan demikian pencetakan ORI yang ada di Jakarta otomatis terhenti dan dipindahkan ke pedalaman seperti Yogyakarta, Solo dan Malang. Karena Yogyakarta sebagai ibukota RI maka uang hasil cetakan di daerah-daerah tersebut dikirim ke Yogyakarta untuk diatur pendistribusiannya. Dan tempat pengeluaran semuanya adalah di Yogyakarta.

Tahun 1946 sampai dengan 1949 adalah tahun revolusi. Ketika rakyat sedang berada pada puncak semangat kemerdekaannya, Belanda datang dengan niat ingin menjajah kembali. Dua kekuatan itu bertemu dalam sebuah suhu politik di Indonesia. Maka pada periode tersebut banyak terjadi pertempuran sengit antara pasukan RI dan Belanda. Bukan hanya itu saja, dalam bidang ekonomi ORI juga melakukan perlawanan sengit melawan Uang Nica (*uang merah*). Sejarah telah membuktikan bahwa ORI lebih mendapatkan tempat di kalangan rakyat.

Pada masa perang kemerdekaan 1948-1949, pencetakan ORI selalu berpindah-pindah. Hal ini untuk menghindari pasukan Belanda yang sewaktu-waktu dapat menemukannya dan membakarnya. Jika hal itu terjadi akan berakibat fatal bagi perkembangan perekonomian pada waktu itu. Salah satu tempat yang tidak dapat dikesampingkan keberadaannya terkait dengan pencetakan ORI di Yogyakarta pada masa revolusi adalah dusun Srunggo dan Kajor Kelurahan Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Di tempat inilah proses pencetakan ORI berlangsung. Ketika itu Yogyakarta telah dikuasai oleh Belanda melalui agresi militernya yang kedua pada bulan Desember 1948.

Setelah disetujuinya Perjanjian Roem Royen yang menyatakan bahwa pemerintahan dikembalikan ke Yogyakarta serta pengembalian para pemimpin RI yang ditangkap sewaktu agresi militer Belanda II bulan Desember 1948,

maka pencetakan ORI kembali ke kota Yogyakarta yaitu di Percetakan Yaker di Jl. Loji Kecil, dan Percetakan Kanisius di Secodiningratan.

Demikianlah bahwa kelahiran ORI menjadi catatan sejarah bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya negara Republik Indonesia. ORI lahir dalam kancan revolusi, dan kemudian berkembang menjadi alat revolusi. ORI bukan saja hanya sebagai alat pembayaran, namun juga ORI menjadi penanda kedaulatan bangsa Indonesia dengan kapasitasnya sebagai mata uang resmi milik negara yang juga sebagai simbol dan identitas jati diri bangsa. Kelahiran ORI mengukuhkan kedaulatan negara Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.34/OT.001/MKP-2006, tanggal 7 September 2006, disebutkan bahwa Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta sebagai museum khusus merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, yang bertugas melaksanakan pengumpulan, perawatan, pengawetan, penelitian, penyajian, penerbitan hasil penelitian dan pemberian bimbingan edukatif tentang benda dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia di wilayah Yogyakarta.

Dari pernyataan di atas, dikaitkan dengan sejarah dan perkembangan ORI (*Oeang Repoeblik Indonesia*) yang terdiri dari 5 emisi yang berangka tahun 1945, 1947, 1948, dan 1949, hendaknya Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta mampu menceritakan tentang sejarah dan perkembangan ORI tersebut. Artinya diharapkan museum dapat memiliki ORI dari tiap-tiap emisi minimal 1 lembar setiap satuannya. Disamping itu dari koleksi yang telah ada, terdapat klise pencetakan mata uang, diharapkan dapat dilengkapi.

Mengingat proses pencetakan dan peredaran ORI relatif tidak lama, yaitu tahun 1945-1949, diharapkan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta dapat menyajikan sajian koleksi (pameran) khusus tentang ORI, dengan menyajikan segala sesuatu yang terkait dengan sejarah dan perkembangan ORI.

Untuk menjaring adanya masukan dari masyarakat, maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan tugas pokok dan fungsi Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Dengan demikian masyarakat akan tahu bagaimana harus berperan serta dan turut proaktif dalam pengembangan museum. Khususnya dalam pengumpulan benda-benda bernilai sejarah yang besar manfaatnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang sejarah.

DARTAR PUSTAKA

1. Dharmono Hardjowidjono (ed), *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta Jilid II*, (Yogyakarta : Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan DIY, 1984/1985)
2. Dwi Ratna Nurhajarini, *Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) Peranannya Dalam Perjuangan Bangsa 1946-1950*, (Yogyakarta : Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 1994)
3. *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru – van Hoeve)
4. [http // museum virtual.org](http://museum.virtual.org) dan [http//id.wikipedia](http://id.wikipedia)
5. http://id.wikipedia.org/wiki/Percetakan_Uang_Republik_Indonesia#Sejarah
6. <http://rinanditya.webs.com/ekonomi19451959.htm> *Keadaan Ekonomi Indonesia Pada Masa Awal Kemerdekaan 1945 Hingga 1950.*
7. <http://www.rumahuang.com/sejarah-mata-uang-indonesia>
8. <http://www.uang-kuno.com/2008/03/sejarah-uang-indonesia-1.html>
9. Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid 6, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993),
10. Mohammad Hatta, “Menoetoeop Masa Penderitaan dan Kesoekaran”, *Kedaulatan Rakjat* tanggal 30 Oktober 1946.
11. Museum virutal <http://www.museum.virutal.org>
12. Notosusanto Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI*, (Jakarat : Balai Pustaka, 1993)
13. Oe Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Jilid I (1945 – 1958)*, (Jakarta : LPPI, 1991)
14. Perum Peruri, *Pencetakan Uang Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa, Cukilan Fakta Dan Peristiwa*, (Jakarta : Perum Peruri, 1988)
15. Rahmawati Fitriani, *Perjalanan Panjang ORI*, (Bandung : Remaja Rasdakarya, 2008)
16. *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogyakarta*, (Jakarta : Kementerian Penerangan, 1953)
17. *UU No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral*

18. Wikipedia, <http://rd.wikipedia.org/wiki/uang>
19. Wiratsongko, dkk , *Banknotes and Coins From Indonesia 1945-1949*, (Jakarta : Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949 Dan Perum Peruri Jakarta, 1991)

